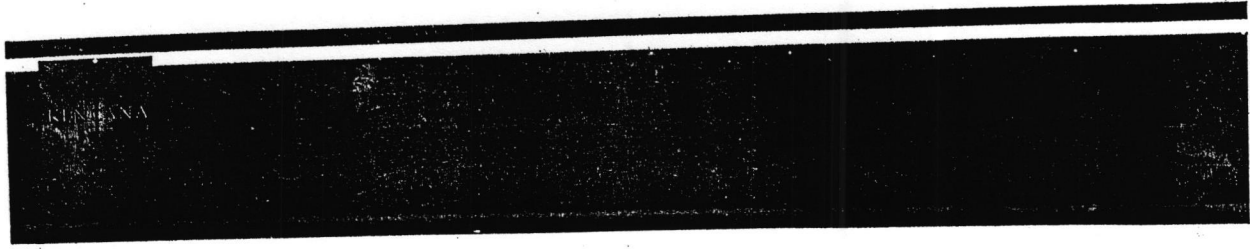


PAKDE
KARWO



INDONESIA
INCORPORATED

Solusi Menghadapi MEA



PAKDE KARWO
INDONESIA
INCORPORATED
SOLUSI MENGHADAPI MEA

Editor:

Dr. H. Suparto Wijoyo
Prof. Dr. H. Prasetijo Rijadi

10x60%
= 6.



PAKDE KARWO: INDONESIA INCORPORATED SOLUSI MENGHADAPI MEA

Edisi Pertama
Copyright © 2016

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-0895-84-0

19 x 26 cm

I, 688 hlm

Cetakan ke-1, Maret 2016

Kencana. 2016.0644

Editor

Dr. H. Suparto Wijoyo
Prof. Dr. H. Prasetyo Rijadi

Desain Sampul

Tim Rembuk Kebangsaan Nusantara

Penata Letak

Tim Produksi

Percetakan

Kharisma Putra Utama

Divisi Penerbitan

KENCANA

Penerbit

PRENADAMEDIA GROUP

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp. (021) 478-64657 Faks. (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Daftar Isi

Pengantar	ix
Prolog	
Lompatan Gemulai dalam Tarian Mewujudkan Indonesia Incorporated...	xiii
Daftar isi.....	xxxv

INDONESIA INCORPORATED

BAGIAN I

Indonesia Incorporated sebagai Solusi Menghadapi MEA..... 3

Oleh: Dr. H. Soekarwo
Gubernur Jawa Timur

A. Pendahuluan.....	4
B. Potensi Ekonomi dan Tema/Visi Pembangunan Negara-Negara Sekawasan	5
C. Potensi Ekonomi Jawa Timur.....	6
D. Menata Ulang Aspek Legal (Reregulasi) sebagai Faktor Input dalam Mewujudkan Kesejahteraan.....	17
E. Strategi Pembangunan Ekonomi Jawa Timur.....	19
F. Penutup	36
Referensi.....	40

Konfigurasi Indonesia Incorporated dalam Negara Kesejahteraan: (Perspektif Regulasi-Deregulasi-Reregulasi Good Corporate Governance)....43

Oleh: Dr. H. Suparto Wijoyo - Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan,
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Prof. Dr. H. Prasetijo Rijadi - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara

A. Dunia Terus Berubah Dinamis.....	43
B. Good Corporate Governance (GCG) Dalam Konstalasi Dinamik Perekonomian Global dan Nasional.....	49
C. Memahami Negara sebagai Korporasi untuk Mewujudkan Indonesia Incorporated.....	57
D. Menata Ulang Legal Frameworks Perekonomian Nasional dalam Meneguhkan Negara Kesejahteraan Indonesia	69

MEA, Menggugah Membuat Kinerja Menyejarah

Oleh: Dr. H. Suparto Wijoyo

Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

A. MEA, MEMAKNAI YANG LALU UNTUK KINI DAN ESOK WAKTU

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)—*ASEAN Economic Community* (AEC) dalam perspektif peradaban bangsa Indonesia dari wilayah Jawa Timur bukan konstalasi baru yang mesti dihindari, tetapi tanda pemberi ruang untuk meneguhkan kembali daya saing yang pernah dicanangkan dari Imperium Majapahit, maupun kerajaan-kerajaan pendahulunya. Ribuan literatur dan berlaksa-laksa pitutur dapat dirujuk untuk menuliskan kesejarahan yang membahanakan Nusantara sebagai mata rantai kejayaan yang pernah digerakkan dari titik geograsif Jawa Timur. Kebudayaan Austronesia adalah lembar kehidupan Asia Tenggara yang bersentuhan dengan Jawa Timur telah dicatat sejak era sebelum ataupun sesudah abad permulaan Masehi. Kawasan Indocina dan Pasifik serta pulau-pulau Nusantara yang merentangkan perdagangan dari Jawa bagian timur terus menggelora sejak beribu tahun lalu. Transaksi dagang Jawa-Sumatera-Maluku-Malaka dan negara-negara yang kini masuk Asia Tenggara menemukan momentum legendaris semenjak masa Sriwijaya, yang di Jawa Timur menyambunginya lebih gemilang pada zaman Prabu Airlangga. Pergaulan antarwarga dan perlindungan hak-hak warga ditata secara yuridis oleh Prabu Airlangga dengan melakukan Kodifikasi Hukum dalam *Kitab Siwasasono* pada 1019.

Mempelajari kitab-kitab tua sekaliber *Kitab Siwasasono* (1019) dan buku-buku induk yang mengisahkan geliat kenegaraan dengan basis kehidupan pribadi raja seperti karya Mpu Kanwa, *Arjuna Wiwaha* (1030), *Rawiaton Sabeu'ah* di Aceh (1069), *Hariwangsa dan Gatotkacasraya* karya Mpu Panuluh (1125), kreasi Mpu Dharmaja *Smaradhanana* (*Kidung Cinta*) (1125), *Bharatayudha* gubahan Mpu Sedah (1157), sampai pada karya Mpu Prapanca, *Deca Warnana* atau *Nagara Kertagama* (1365), Mpu Tantular, *Arjunawijaya* (1367) yang kemudian merampungkan buku terkenalnya *Sutasoma* (1389), sampai pada karya Nuruddin Ar-Raniri, *Bustanul Salatin* (*Taman Raja-raja*) (1640), pastinya dapat membuncahkan semangat bahwa Nusantara yang di dalamnya ada Jawa Timur menjadi poros utamanya adalah berdaya saing tinggi untuk pergaulan global. Jawa Timur memiliki topografis dan demografi yang mengagumkan dengan kualitas kepemimpinan (*leadership*) yang terus mewarnai dinamika Nusantara (Bangsa Indonesia).

Sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) selalu diperhitungkan dalam babakan sejarah mana pun dari era paling purba sampai kekinian. Jawa Timur alamnya dikepeng laut dan gunung yang kemudian dipandu aliran sungai yang terus mengalir berkelok laksana taman surga yang tergambarkan dalam Kitab-kitab Suci. Dari barat kita memiliki Gunung Lawu dan Gunung Wilis yang lembahnya mengelokkan indahnya Sungai Madiun sebagai bagian alir anak Bengawan Solo yang dahulu pernah berdiri tegar Kerajaan Wengker. Bergeser ke Barat, Jawa Timur mempunyai Kali Brantas yang tatanan airnya laksana sedang maraton melingkari Gunung Welirang, Arjuna, Kelud (Kampud), dan Kawi sebelum *sumeleh* di Surabaya maupun Porong, bahkan Bangil. Aliran Kali Brantas di Mojokerto pada abad ke-13 sampai awal abad ke-16 menjulangkan Kota Trowulan yang menjadi pusat kekuasaan Nusantara yang bernama Majapahit. Sebelumnya juga berkembang kekuasaan penting yang dihidupi dari Kali Brantas: Kerajaan Kediri sebagai ibukota raya abad ke-12, Candi Penataran di Blitar yang di hulunya dapat disaksikan guliran ritmis sang waktu sampai adanya Bendungan Wlingi, Kesamben, dan Karangates yang lahir atas nama tradisi agraris yang tertoreh dari Jawa Timur. Kedaulatan pangan digarap para leluhur dengan budaya alir Kali Brantas dan Bengawan Solo serta ribuan sungai yang menjadi nadi kehayatan berdirinya negara besar dan kuat di tanah Jawa Timur.

Itulah yang sungguh-sungguh harus menggugah siapa saja untuk membuat kinerja bersejarah, yakni kinerja yang *menyejarah* yang mampu ditindaklanjuti generasi mendatang (*future-generation*). Jawa Timur yang secara geografis sebagai bagian dari (Pulau) Jawa menyodorkan permaknaan betapa pentingnya wilayah ini bagi Indonesia. Kepemimpinan dalam bentara Jawa Timur dalam episode sejarah Nusantara bukankah terpetakan sejak era klasik zaman nabi-nabi, mpu, begawan, mahapatih, akuwu, panembahan, tumenggung, dan kronika raja-raja besar terlukiskan dari Jawa Timur yang kini dipimpin seorang gubernur yang bernama Dr. H. Soekarwo. Pakde Karwo, begitu warga Jawa Timur menyapanya, adalah Gubernur Jawa Timur pertama yang dipilih langsung oleh rakyat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 29 Agustus 2008 dan dilantik sebagai Gubernur 12 Februari 2009 untuk masa pengabdian 2009-2014.



Sumber foto: dprd.jatimprov.go.id



Sumber foto: www.beritadaerah.co.id

Kepemimpinan Pakde Karwo dari berbagai data yang telah terekam dalam beragam dokumen publik yang juga telah dikembangkan oleh Tim Penulis buku ini menunjukkan kinerja yang berkerakyatan dengan akuntabilitas demokrasinya. Pakde Karwo terpilih kembali sebagai Gubernur Jawa Timur untuk periode 2014-2019 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 29 Agustus 2013 dan dilantik pada 12 Februari 2014. Kepemimpinan Pakde Karwo memberikan capaian kinerja yang progresif dengan elaborasi yang terukur. Daftar penghargaan untuk Pakde Karwo dari 2009-awal 2016 ini, sebagaimana dalam Prolog, merupakan wujud kepemimpinannya yang diapresiasi beragam lembaga atau institusi yang dalam tata kelola pemerintahan tentu saja telah melalui evaluasi selektif.

Semua itu memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya penghargaan tersebut bukan sekadar masalah label bahwa Pemerintahan Provinsi Jawa Timur bekerja, tetapi hal itu telah menuangkan etos bekerja bukan hanya untuk bekerja melainkan bekerja dengan target yang jelas untuk kesejahteraan rakyat. Birokrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur memahatkan nilai-nilai yang diusung oleh Pakde Karwo untuk memberikan layanan terbaiknya bagi kepentingan rakyat. Penghargaan pada rotasinya adalah manifes publik yang diterima untuk menjadi penanda adanya kepemimpinan yang diabdikan untuk rakyat, karena menjunjung mandat demokrasi yang diraihinya selama ini. Jawa Timur dalam kepemimpinannya mengingatkan guratan historis yang memang selayaknya diemban mengingat wilayah ini merupakan basis kultural yang telah dikenang. Prestasi yang diberi penghargaan sejatinya mengikat jiwa kepemimpinan untuk lebih bertaut dengan rakyatnya. Dalam kosmologi relasi antara Pakde Karwo dan warga Jawa Timur memiliki komitmen untuk memayungi, mengayomi, melayani, dan menjadi pengemban amanat Tuhan dalam memberikan kemanusiaan yang terhormat. Pakde Karwo menginspirasi dan memberi ruang berimprovisasi secara spesifik pesona Jawa Timur dalam lembaran sejarah lamanya. Melacak prestasi kepemimpinan masa lalu untuk membangun kaidah pemerintahan yang kuat bagi rakyat adalah generator tersendiri. Maukah kita mengingat dam menjelajahi serta menyinggahi anak tangga fondasi pemahaman yang dapat menjadi motivator kehidupan publik masa depan.

B. KALI BRANTAS-MAJAPAHIT DAN MEA

Pilih saja semisal mozaik Kali Brantas secara historis sebagai penanda cinta sejarah dalam kerangka membangun daya saing pada era MEA. Tidak bermaksud menjadi ahli sejarah Kali Brantas, tetapi kita perlu mengerti meski sekilas kesejarahan Kali Brantas. Tanpa berorientasi sebagai arkeolog, namun memaknai artefak sejarah adalah diniscayakan bahwa Kali Brantas itu menarik dan semua pihak di Jawa Timur sepatutnya tertarik. Lebih dari 16 juta penduduk Jawa Timur menggantungkan hidupnya dari aliran Kali Brantas. Tanpa Brantas kita tidak dapat membahayakan Sumpah Palapa atau Nusantara serta adanya kehidupan yang berkelanjutan di Jawa Timur. Untuk itulah suatu pilihan strategis di mana Pakde Karwo pada kenyataannya sangat serius mengatasi problematika ekologis Kali Brantas. Gerakan bersih-bersih Kali Brantas yang dipandegani Pakde Karwo adalah tindakan mulia. Dan, sekadar mengingatkan bahwa KAPAL Jawa Timur telah melakukan *Ekspedisi Laksamana Nala Clean-Up Brantas* pada 5 Mei 2012. Acara itu dilakukan berantai dengan melibatkan 40 ribu pengabdian lingkungan yang tersebar dari

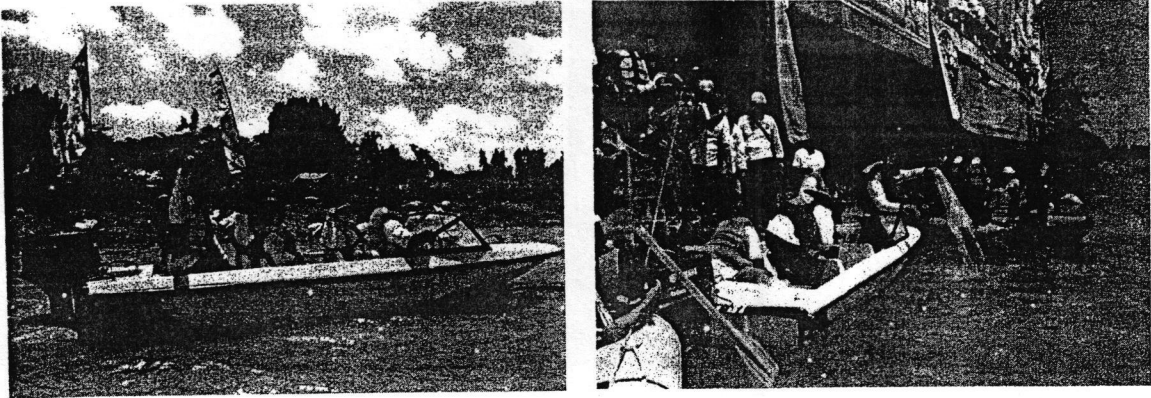
puluhan kabupaten/kota yang dilintasi Kali Brantas maupun para aktivis dari beragam daerah di Indonesia.

Kita para pengabdian lingkungan Jawa Timur dalam kepemimpinan Pakde Karwo mendapatkan semacam *tugas kesejarahan* untuk melakukan ekspedisi yang membawa nama besar Laksamana Nala era abad ke-13-14. Sebagaimana terungkap dalam catatan historisnya, Imperium Majapahit dikonstruksi untuk menjadi Kerajaan Besar yang menyatukan seluruh kepulauan Nusantara. Pada tahapan gagasan, sesungguhnya cita-cita ini merupakan implementasi dari ide dasar “Negara Nusantara” yang telah diletakkan landasannya oleh Prabu Airlangga yang bergelar *Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Anantawikramattungadewa* pada abad ke-10-11. Prabu Airlangga adalah raja besar yang berpengaruh luas di Asia Tenggara maupun Asia Selatan sampai pada perkembangannya dimantapkan oleh Kertanegara pada era Kerajaan Singhasari pada abad ke-12-13 yang menjawai suara hati Gayatri Rajapatni anak kinasihnya, yang pada lembaran berikutnya menjadi Ibu Suri Imperium Majapahit, istri Raja Raden Wijaya yang menempuh *lelaku* perjalanan dari Daha Kediri selama tujuh hari untuk membuka kawasan baru di tepian Kali Brantas dengan tim kreatif dari Madura.

Untuk itulah kenapa pada 2012 puluhan ribu pengabdian lingkungan sebelum kumpul semua di areal Mlirip, Jetis, Mojokerto, setahun sebelumnya, mereka melakukan pembersihan fisik dan mental untuk melakukan ekspedisi di Kali Brantas, adalah untuk mengenang dan mencanangkan gerakan kolektif tanda terima kasih kepada Tuhan atas Kali Brantas yang sejak zaman Raja Airlangga sampai Raja Raden Wijaya, dan Raja-raja berikutnya ditata dan diperhatikan secara paripurna bagi pengembangan moda transportasi, irigasi dan sumber energi negara. Majapahit mencapai keemasannya di zaman Raja Hayam Wuruk serta Mahapatih Gajah Mada, Djoko Modo dari Pamotan yang kini Lamongan, dalam lecutan romantika dinamik Kali Brantas.

Momentum historis untuk menguak kembali pengharapan leluhur agar seluruh wilayah Nusantara bersatu dalam naungan manajemen kenegaraan yang bersatu, maka Ibu Suri Gayatri dan Raden Wijaya menanamkan cita ini sebagai Visi-Misi capaian bersama dalam Kerajaan Majapahit, 1293. Para penerus yang memiliki komitmen ini tiba di tangan Tribuanatunggadewi sebelum akhirnya menyerahkannya kepada anaknya yang bernama Hayam Wuruk. Pada sisi waktu Hayam Wuruk dengan pendamping kepala pemerintahan Mahapatih Gajah Mada beserta dukungan ketentaraan Laksamana Nala (yang semula adalah seorang Resi alias Mpu, harus turun dari “kampus” turut mengembangkan kewilayahan dalam cita besar Kerajaan Majapahit dengan armada lautnya yang tangguh dan disegani), menjadikan Kali Brantas sangat vital bagi Majapahit. Saat itu Eropa belum diperhitungkan dengan daya saingnya sebagaimana abad ke-20-21 ini, karena Majapahit menguasai jalur maritim sebagai sumber kekuasaan dunia yang menyambung dengan jalinan kerja sama dengan Cina dan India. Pada masa itulah Laksamana Nala merealisasikan doktrin ideologis untuk bersatunya Nusantara yang telah dicanangkan dalam *Sumpah Amukti Palapa* pada Rapat Kabinet pertama setelah pelantikan Mahapatih Gajah Mada.

Dari areal di Desa Mlirip, Jetis, Mojokerto, inilah terkabarkan pemberangkatan 40 ribu pasukan Kerajaan Majapahit untuk mempersatukan Nusantara dalam kerangka “ekspedisi teritorial”. Semangat inilah yang mewarnai dan mengkrystal dalam ruang

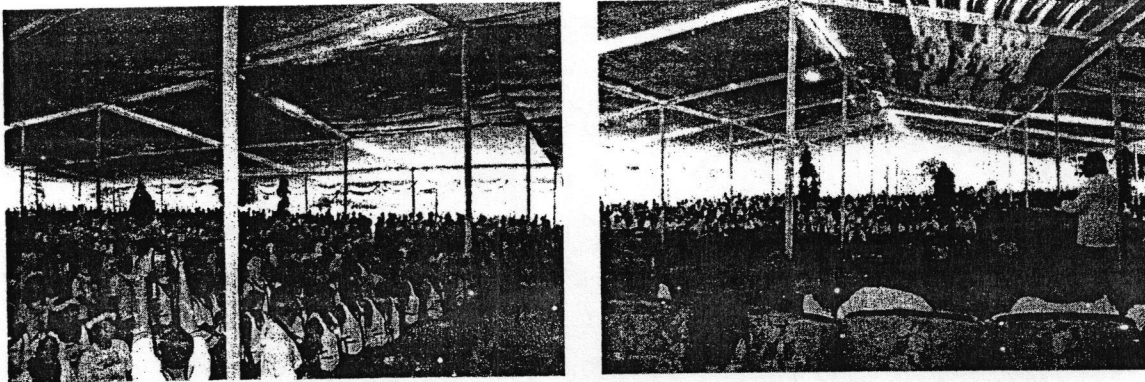


Pakde Karwo bersama Bude Karwo dan Pimpinan Daerah Mojokerto melepas benih ikan ke Kali Brantas dalam acara *Clean Up Brantas*.

jelajah pengabdian lingkungan, sehingga saat itu berkumpul sekitar 40 ribu pengabdian untuk melakukan ekspedisi sebagai langkah ekspansi ide, gagasan, dan semangat untuk menjadi inspirasi bagi Indonesia yang bersih, hijau, dan biru. Hal ini berarti para pengabdian lingkungan tidak melakukan kegiatan ekspansi teritorial tetapi ekspansi ideologis atau cita-cita untuk menjaga Kali Brantas tetap lestari fungsinya bagi kebutuhan publik Jawa Timur untuk dapat diterapkan di daerah aliran sungai (DAS) lain di NKRI. Inilah bangunan bersejarah yang menyemangati mengapa Kali Brantas harus *diramut*, *dirumat*, dan *diruwat* secara sungguh-sungguh oleh semua pengabdian lingkungan di Indonesia. Kami semua hendak menjadikan sejarah sebagai pesan yang menggugah bagi kebangunan Indonesia yang memiliki latar peradaban gemilang. Pada tahapan ini perlu sekalian dituliskan mengenai DAS Kali Brantas.

Daerah Aliran Sungai yang umum disingkat DAS bukanlah penamaan baru. Istilah DAS memang dalam bingkai hukum hanya muncul belakangan di kala menjadi materi muatan regulasi sungai di NKRI. DAS dalam makna peradabannya adalah kosakata yang menyimbolkan betapa tuanya lakon sejarah persungai. Kali Brantas pada takaran tertentu membingkai jalinan ekosistem tanpa batas administratif. Kondisi geografis-ekologis terpotret secara apik dalam lirik-lirik langgam sungai yang bahasa asalnya adalah kali. Kali untuk masalah sungai bukanlah soal rumusan perhitungan matematika yang bersentuhan dengan bilangan. Kali dalam konteks perjalanan peradaban adalah laku-lakon soal perairan alias soal *banyu*. Istilah *banyu* ini pun mengenal dialek lokalnya dengan ajaran-ajarannya. *Banyu* bukanlah soal angin yang mendayu yang mampu dibuat terbang tinggi oleh burung legendaris Jatayu, melainkan sumber kehidupan yang kemudian di beberapa daerah lahir sebutan *Banyu Urip* di Surabaya atau *Banyuwangi* di tepi paling timur Pulau Jawa. Banyuwangi mengenangkan cerita tersendiri dalam tahapan lakon-lakon cerita rakyat. Ada yang menafsir di era Minakjinggo maupun di masa kelana Syekh Wali Lanang alias Maulana Ishak yang hidup untuk meletakkan dasar-dasar adab perwalian di Tanah Jawa.

DAS pada lingkup masyarakat bersentuhan dan memang demikian adanya bermula dari hal sungai, yaitu Kali. Masalah *kali* yang mengalir air untuk memberi pesan dan

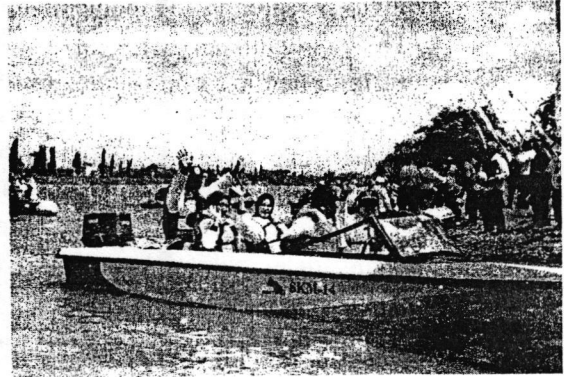


Pakde Karwo di hadapan ribuan pengabdikan lingkungan Jawa Timur menyapa dan membakar semangat.

membungkus hidup diperlakukan dengan amat terhormat dan bismillah. Sebutannya pun menjadi tetenger yang menyejarah untuk tidak dijarah oleh generasi berikutnya sebagai “jalur sutera air” yang di Tataran Sunda dikenal dengan “Ci”. Kali Brantas, Kali Surabaya, Kali Tengah, Ciliwung, Citarum, dan berselancar pula istilah Bengawan Solo yang mampu membela Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk diberi tata krama hidup. Bengawan Solo yang mengular dari Gajah Mungkur hingga Malang tentu bukan bermaksud untuk membelakangi publik atau untuk memberi kesan akhir bahwa akan malang nasibnya. Malang memberi arti jangkauan yang menandakan bahwa Bengawan Solo mesti dijaga dalam ritme peradaban apa pun dan siapa pun. Kita semua memiliki pesan ekologis yang historis untuk menjamin bahwa air bengawan tidak akan gagal dalam memberi layanan kehidupan.

Untuk itulah Almarhum Gesang dengan tepatnya membaikkan suara itu dalam lagu *Bengawan Solo ... yang mengalir sampai jauh ... air mengalir sampai jauh akhirnya ke laut. Itulah air riwayatnya dulu. Paling terjaga selalu naik itu perahu*. Renungkan dan resapi maknanya. Air ini memang sangat terjaga. Dan, kita semua dapat menafsir apa pun atas air Bengawan Solo, yang penting jangan sampai airnya berhenti mengalir sehingga Bengawan Solo menjadi Bengawan Worong alias Bengawan Gagal yang pernah mewarnai cerita rakyat di Lamongan. Tentu saja kisah dan persaksian Bengawan Solo lebih dari yang bisa dicatat oleh literatur, karena sumber tutur lebih variatif dalam bercerita tentang Bengawan Solo. Airnya mengalir sampai jauh apalagi dengan naik itu perahu pasti telah menyimpan misteri bagi kita meski itu fakta bagi dirinya sendiri. Bengawan Solo telah merentangkan sayap sejarah sedemikian tua dan Pakde Karwo di DAS Bengawan Solo juga membentangkan program yang membuat warga dari Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik sampai Malang menikmati manfaatnya.

Kali Brantas dan Bengawan Solo yang keloknya menentukan jalan hidup Jawa Timur telah mencatatkan diri sebagai nadi utama keemasan Majapahit yang terukir dalam lembaran refensi mana pun secara objektif. Oleh karena itulah dalam menghadapi MEA 2015 adalah bukan untuk minggir atau menyingkir tetapi berdiri tegak penuh santun dengan membuka pintu selebar-lebarnya, karena Jawa Timur memang sejak dari *sononya* telah terbiasa menjadi “pengembara peradaban” yang terus berkelana menjadi pelayan



Pakde Karwo bersama Pimpinan Daerah Mojokerto, dan warga masyarakat melakukan bersih-bersih kali dalam acara "Clean Up Brantas".

kehidupan dan sekaligus penentu arah zamannya di Kawasan Asia. Warga Jawa Timur sanggup bertanding dan bertandang di Pasar Bebas ASEAN dengan cara lapang dada untuk bersanding. Semua SDA dan SDM serta produk-produk warga Jawa Timur dapat disandingkan, ditandingkan, atau ditandingkan kepada publik ASEAN, dan tentu Asia secara keseluruhan adalah cita-cita yang harus diancangkan.

MEA 2015 merupakan pendulum yang dapat melancarkan peredaran garis hidup Jawa Timur. MEA yang menjadi bagian dari inti yang dinamakan *ASEAN Community* yang di dalamnya ada *ASEAN Security Community (ASC)* dan *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)*. Masyarakat ASEAN berarti telah berjanji untuk bersatu padu dalam kesejahteraan kolektif sesama warga ASEAN. Ini seolah mengingatkan kembali pada kosakata lama bahwa di kawasan Asia yang secara antropologis ada dalam bincangan Kebudayaan Austronesia, memang pernah bersatu dalam komunitas perdagangan untuk sesama manusia Austronesia. Dalam era Majapahit sudah terbiasa terjadi pertukaran barang, jasa, dan mobilitas orang dengan mentransaksikan hasil bumi, produksi, dan tenaga kerja lintas kerajaan (negara) di kawasan Asia. Majapahit adalah lambang keberhasilan



Para pengabdikan lingkungan menyusur Bengawan Solo Lamongan dalam acara ekspedisi napak tilas Mahapatih Gajah Mada.

sekaligus persatuan yang menjembatani kebutuhan publik di kawasan ASEAN sekarang ini. Dengan demikian, MEA 2015 sangat berlandaskan secara historis untuk membuat Jawa Timur berdaya saing siap tanding dan memenangkan pertarungan kualitas. Harus ada kesadaran kolektif bahwa MEA bukan barang instan yang baru dikenal Jawa Timur kalau mengacu pada referensi Kertanegara di kala memimpin Kerajaan Singhasari, bahkan pernah melakukan Ekspedisi Pamalayu.

Ekspedisi dan ekspansi dagang produk Jawa Timur dengan kualitas SDM yang siap tanding adalah pilihan di era MEA yang menyempurnakan skema dagang ASEAN yang dinamakan *Preferential Trading Agreement* (PTA) (1997) dan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) (1992). MEA menggunakan mekanisme pengurangan hambatan tarif dengan *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) terutama terhadap 12 sektor, yaitu:

- ❖ Produk pertanian
- ❖ Angkutan udara
- ❖ Otomotif
- ❖ e-ASEAN
- ❖ Elektronik
- ❖ Perikanan
- ❖ Kesehatan
- ❖ Produk karet
- ❖ Tekstil dan *apparel*
- ❖ Pariwisata
- ❖ Produk kayu, dan
- ❖ Jasa logistik.

Jawa Timur dalam kepemimpinan Pakde Karwo telah melakukan pematapan dan pematangan atas sektor-sektor tersebut yang tentunya harus terus ditingkatkan. Ibaratnya pelayaran telah ditempuh dengan rute yang sangat panjang sejak era klasik sampai modern ini, bukan saatnya mengeluh ataupun membangun perahu layar dengan nyaman di galangan. Kapal atau perahu layar atau kendaraan apa pun itu dibuat memang bukan untuk bersandar tetapi untuk menjelajah dengan daya saing yang prima. Kemauan yang menjadi komitmen untuk mengukir kinerja yang bersejarah itulah motivator terbesar yang prinsip-prinsip lakunya telah diletakkan para leluhur. *Sumpah Amukti Palapa* memiliki relevansi dan aktualita dengan modifikasi yang diarahkan dengan gendeng ekspansi daya saing dan bukan ekspansi wilayah dalam penjelajahan yang terus harus maju dari Jawa Timur.

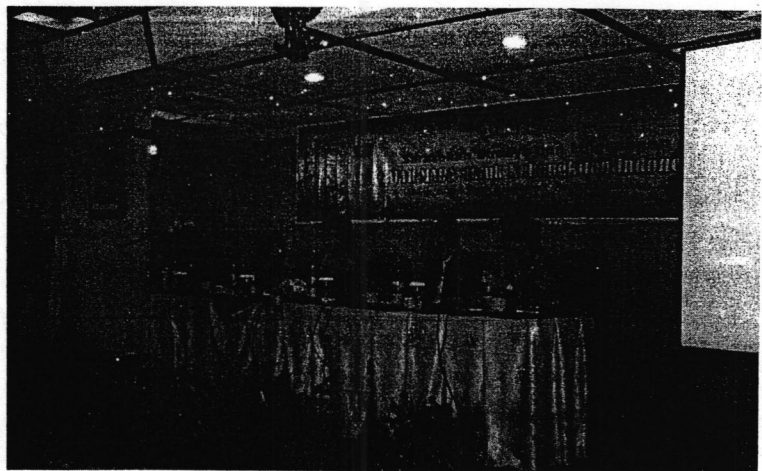
C. TERUS BERJELAJAH YANG MENGGUGAH

Dalam babakan Jawa Kuno di kala awal pendirian kehidupan di Tanah Jawa sebelum *cokromanggilingan* Aji Soko (abad I) sudah berdiri Kerajaan Medang (Kamulan) dengan titik alir yang tidak jauh dari aliran sungai DAS yang kini berada pada lingkup Bengawan Solo. Cerita Kerajaan Demak yang mewarnai sejarah Portugis pada akhir abad XV-XVI lebih menarik lagi di kala DAS ini begitu penting bagi pengembangan irigasi pertanian daerah Jawa bagian utara. Pada masa Kerajaan Pajang jelas mengisahkan tetenger

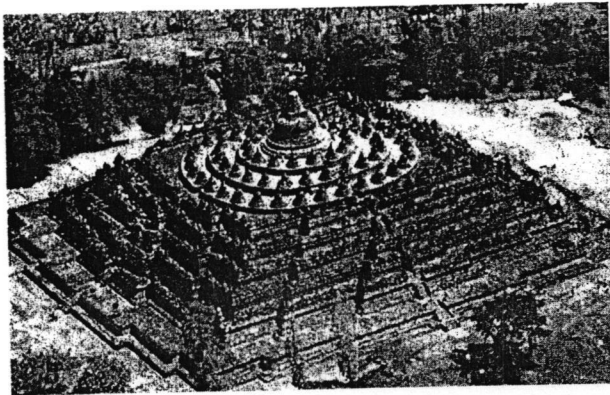
yang lebih seru di kala Jaka Tingkir yang kemudian dengan sangat keramat mendirikan Kerajaan Pajang melalui sebutan Sutan Hadi Wijaya. Pengelanaan Jaka Tingkir dari daerah yang kini masuk Pantai Utara Jawa Timur ke arah barat tentu menarik dipelajari. Bagaimana soal perahu dan para buaya (baik simbolik maupun puji dan caci dari versi Ratu Kalinyamat serta Ario Penangsang) adalah pertanda bahwa hidup dalam deretan DAS adalah sudah dari takdir Pulau Jawa, termasuk Jawa Timur.

Sebelum itu jauh dari abad XII-XIII, cerita Ronggolawe dengan pertempuran heroiknya di Tuban adalah warna dan lembar historis yang perlu dikembangkan dalam pengajaran budaya persungai di Tambak Beras (Jombang). Banyak hal tentang perairan yang sangat terkait dengan pertanian dan perdagangan yang dapat digali sebagai pesan masa depan dari kisah masa lalu nenek moyang di seluruh wilayah Indonesia untuk MEA. Bukan soal trik dan taktik politiknya melainkan dari segi pelestarian persungaiannya. Sungai yang terbungkus dalam DAS telah memiliki jalan cerita sendiri yang tertata melalui kisanan pusran kuasa. Ada intervensi istana (birokrat) dalam mengelola DAS yang berarti DAS memang butuh kebijakan sekaligus tindakan dari pemerintahan negara pada rentang sejarah mana pun. Kalau tidak maka sungai akan tinggal ungkapan cerita yang diejek dengan lagu-lagu rakyat yang bersifat menyindir: "... eh dayoe teko ... asune mati buang nang kali..." Kali dijadikan tempat pembuangan bangkai bukan untuk menyerukan bahwa sungai itu tempat pembuangan sampah alias tong sampah raksasa melainkan suatu pesan moral yang disampaikan rakyat kepada penguasa yang saat itu tidak memeliharanya. Pengabdian lingkungan hadir untuk mengusung pesan itu melalui jalinan laku lingkungan dengan bersih-bersih Kali Brantas bersama Pakde Karwo adalah sebuah pilihan utama untuk menyongsong hidup yang baik secara ekologis.

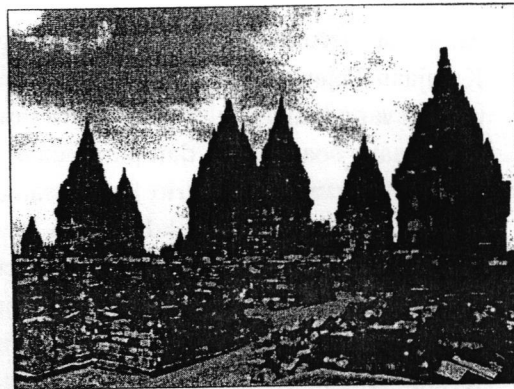
Kali Brantas yang mengisahkan cerita bahkan menjadi kalung cerita itu sendiri. Perlu ditambah sedikit bahwa Kali Brantas pada mulanya hanyalah aliran kecil yang tidak memiliki bobot sebagai sungai dalam pengertian sekarang. Aliran yang tercipta secara alami dalam rangka menampung dan menjadi "korban" rembesan-rembesan pegunungan-



Sarasehan Budaya dan Lingkungan "Spirit Gadjah Mada untuk Kebangkitan Indonesia" bersama Emha Ainun Nadjib, 2013.



Sumber foto: www.globalindonesiavoices.com



Sumber foto: en.wikipedia.org



sumber foto: Wikimedia.org

an saja. Pada abad ke-8-9, Kali Brantas tidak lebih dari “saluran irigasi murni” yang tidak mendapat sentuhan dari kekuasaan secara optimal-fungsional. Dengan kesadaran dan pembelajaran yang cermat Kanjeng Gusti Prabu Airlangga, pada abad X-XI dengan generasi penerusnya sampai di era Hayam Wuruk telah mampu mengerahkan teknisi dan ahli serta tenaga kerja untuk mampu membuat suatu aliran yang mencengangkan untuk ukuran saat itu. Kali Brantas akhirnya menjadi jalur transportasi perairan yang besar. Kapal-kapal dan perahu-perahu perdagangan serta persenjataan terus menggeliatkan dan meramaikan suasana airnya. Pada lingkup 200 tahun setelah Singhasari dalam cerita literatur yang dikemas dengan dasar tutur lebih dahsyat lagi. Bagaimana hubungan Kadiri dengan Tumapel yang merepresentasikan semakin segmentalnya perpecahan politik kerajaan-kerajaan Jawa di sisi Timur. Pada era Tunggul Ametung dengan Mpu Gandringnya

dapat memanfaatkan Kali Brantas sebagai jalur untuk mengerukkan tambang pasir bagi kepentingan penguatan persenjataan negara. Dibangunlah pabrik-pabrik persenjataan yang tangguh meski kemudian disalahartikan dengan koalisi strategis antara Kebo Ijo dengan Mpu Gandring yang tercium oleh Ken Arok dengan dukungan penuh dari Majelis Para Sesepeuh yang dikomandani Kanjeng Gusti Lohgawe.

Kali Brantas tentu lebih banyak bisa berkisah lagi semasa kekuasaan bergeser dengan lahirnya Majapahit. Tentara Tartar alis Mongol dan petualangan prajurit akibat runtuhnya Singhasari yang kemudian atas dasar pemikiran cerdas Aria Wiraraja untuk mendorong pengabdian besar Raden Wijaya yang babak akhirnya mendirikan Majapahit, pasti Kali Brantas dapat memberikan informasi tematik yang lebih rinci. Kali benar-benar telah memberikan sejarah besar serta memiliki cerita peradaban mengenai perjalanan bangsa, yang sayangnya Hukum Lingkungan secara kurikulum tidak mendeskripsikan sejarah hukumnya. DAS Brantas pun pada akhirnya menjadi centrum kekuatan negara saat itu dengan perhitungan untuk memakmurkan Desa. Pitutur Raja adalah lindungi Desa sebagai sumber pangan bagi negara, maka perairan harus dijaga termasuk pengembang-

an transportasi perairan yang hebat. Pesta rakyat yang sakral secara spiritual dengan perahu hias untuk menghormati leluhur diselenggarakan penuh semarak dengan bingkai *Banawa Sekar*.

Majapahit telah meneguhkan kehebatannya dalam rentang lebih dari 200 tahun yang disegani di kawasan yang kini masuk MEA. Demak sendiri juga bertumpu pada armada perairan dan laut. Hanya saja kemudian Mataram baru yang diusung Panembahan Senopati akibat janji Sutan Hadi Wijaya untuk memberi hadiah Tanah Hutan Mentaok telah bergeser ke arah agraris. Ini dapat dimaklumi karena masalah hutan secara ekologis juga harus dikonservasi dan dimanfaatkan sebagai lumbung pangan. Maka, Mataram pada masa Sultan Agung sangat agraris karena pengaruh geografis dan tatanan ekosistem Mataram. Demi pengembangan pertanian sebagai penyangga kehidupan negara, Mataram membangun kanal-kanal yang mengalir sawah-sawah dengan sangat baik. Lebih dari itu soal DAS bisa menjadi sumber konflik politik tidak hanya di Jawa tempo dahulu, kini di dunia lain, di Eropa, Timur Tengah, dan juga Asia Selatan acap kali konflik karena air.

D. MENGENANG UNTUK MENANG

Hal-hal demikian perlu disikapi dan terus didorong untuk dipelajari anak-anak muda Jawa Timur untuk memberikan gambaran betapa hebatnya lembaran sejarah leluhur dalam masalah air, hutan, penataan kota, dan desa. Jauh sebelum Eropa mengerti tentang air dalam kiasan yang sinergis dengan industri, sebenarnya kita punya kekayaan historis yang dapat mendudukkan betapa majunya peradaban Jawa Timur era itu. Revolusi industri yang dikenal Eropa pada abad ke-18 pasti jauh dari revolusi industri yang terjadi di era Ken Arok abad XII awal pada zaman Singhasari. Inilah yang mesti terus didalami secara saintifik untuk meningkatkan harkat bangsa yang berdaya saing tinggi. Jawa Timur dan Bangsa Indonesia sudah terlalu lelah dan lama dengan aura pesimisme, maka kini harus dibangun kembali kehebatan-kehebatan leluhur dengan keluhuran budayanya termasuk persoalan tata kelola perekonomian maupun hukumnya di seluruh Indonesia. Belajarlah bagaimana Raja-raja Jawa (Timur) misalnya, mengelola sungai, kota, dan manajemen pemerintahan. Sampai muncul lagu *Bengawan Solo* dari Mbah Gesang tentu bukan sesuatu yang karbitan di abad ke-20 semata. Ini adalah bagian dari titik sejarah adiluhung bangsa yang dikenang untuk menang dalam percaturan global era MEA.

Memperbincangkan persaingan di era MEA tidak elok kalau meninggalkan perspektif historis yang mengalir di Kali Brantas. Penataan Brantas dengan beragam aturan hukum lingkungan yang sekarang tercipta juga dapat memanfaatkan regulasi klasik yang tersimpan dalam banyak kepustakaan kerajaan dan para sesepuh yang memiliki urutan sejarah sampai pada puluhan abad yang silam. Belajar dari kisah Sunan Kalijogo misalnya, bukanlah bagian dari romantisme sejarah Sunan Kalijogo, melainkan menengok kepada lembar peradaban yang pernah ada. Menata sungai pada lingkup inilah ternyata dapat mendengar dari cerita-cerita yang jauh sebelum abad Masehi lahir. Sungai dan DAS bagi bangsa ini ternyata sudah menjadi manajemen kenegaraan. Kalau kini kita berkata merasa lebih maju, di manakah kemajuan itu dibanding era Singhasari, Majapahit, Demak, ataupun Mataram dalam tata kelola lingkungan dan pemerintahan, bahkan era Sriwijaya dan Shailendra dengan Borobudur atau Prambanan jauh melesat maju,

bahkan Candi Penataran di Kota Blitar.

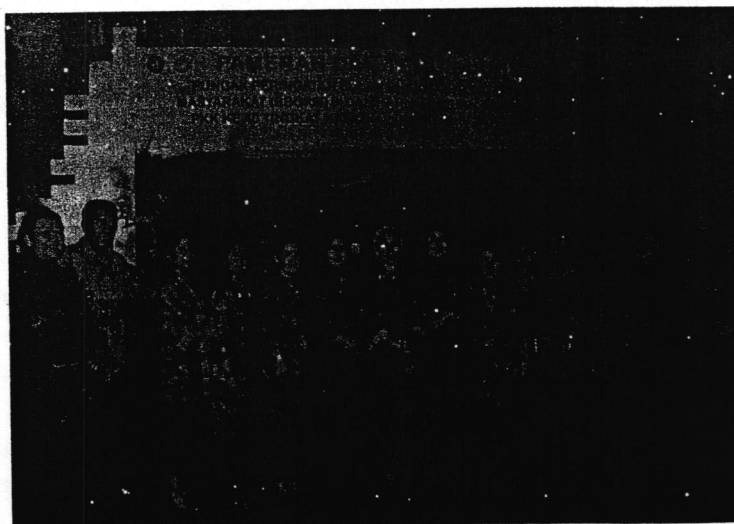
Melihat Borobudur harus disimak dalam kerangka bernegara: bagaimana RPJP Nasional-RPJM atau perencanaan pembangunannya, desainernya, alokasi anggarannya, tenaga kerjanya, materialnya, dan banyak hal yang dapat direnungkan terhadap kemegahannya dalam lingkup yang lebih bumi untuk pemerintahan. Siapa konseptornya, bagaimana struktur kabinetnya dan hubungan kerja pemerintahannya? Penataan ruangnya yang begitu hebat setiap lokasi Candi pastilah dengan berbagai pertimbangan komprehensifnya. Inilah yang di Jawa Timur terus diberi ruang untuk mempelajari dengan kesungguhan kepemimpinan yang mampu menginspirasi yang telah dilakukan Pakde Karwo.

E. ADA WANITA YANG MENGINSPIRASI

Nabi Adam mengalami situasi psikologis yang nyaris jenuh sebelum hadirnya sosok wanita elok yang bernama Ibu Hawa. Kisah pewayangan juga menghadirkan wanita-wanita tangguh penggugah kedigdayaan Pandawa. Ken Arok memiliki semangat juang mendirikan Singhasari, karena atau disemangati keberadaan Ken Dedes yang menyemburkan cahaya, bahkan Tunggal Ametung dengan kesigapannya disorong untuk mengembangkan Tumapel sebelum meraih Ken Dedes, Ibu dari Raja-raja Jawa. Dalam kisah di Jawa Timur yang lebih khusus perlu dipertanyakan siapa wanita yang menginspirasi dan memotivasi Raden Wijaya sampai dengan Hayam Wuruk dan Gajah Mada untuk menyambung sabuk cita-cita Nusantara? Tidak lain adalah Ibu Suri Gayatri Rajapatni. Dialah wanita yang tahu persis semangat nasionalisme ayahandanya Raja Kertanegara zaman akhir Singhasari dan suaminya Raden Wijaya selaku Raja Pertama Majapahit dengan memberikan kisah kepada cucunya yang bernama Hayam Wuruk, melalui Tribuana Tunggaladewi serta diskusi-diskusi hangat bersama Gajah Mada. Pada skala Kebangsaan Indonesia kita mempunyai Ibu R.A. Kartini.

Ibu Suri Gayatri telah memiliki mustika sejarahnya yang mistis-karismatis pada kisah perjalanan panjang Majapahit yang *blue print* kewilayahannya dijadikan patokan oleh para pendiri bangsa Indonesia, Ir. Soekarno maupun Mr. Muhammad Yamin un-

Ibu Nina Soekarwo di acara Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat IX dan Hari Kesatuan gerak PKK Ke-40 Tingkat Nasional



tuk mendirikan NKRI. Tangga sejarah ini tidak cukup dipungut semua dalam gerakan yang terus menjelajah bagi kebangkitan Indonesia yang semakin menyusut. Sedikit kristalnya diambil sebagai contoh. Hari Nasional untuk memperingati semangat juang perempuan muda telah ditetapkan oleh NKRI di tanggal 21 April. Itulah hari lahir R.A. Kartini, Anak Asisten Wedono di Mayong, Jepara yang beristrikan Ngasirah dengan anak-anak yang kemudian sangat hebat sebagai saudara R.A. Kartini, yaitu Sosrokartono yang menggetarkan kecerdasan sebagian besar intelektual Eropa pada zamannya. Pantaslah semua itu terjadi bukan hanya karena R.A. Kartini memang cucu dari Tjondronegoro asal Demak, Bupati Pertama di Jawa Tengah, penyemangat pertama R.A. Kartini, tetapi memang jiwa pembaruan selalu ada dalam diri wanita, di mana pun dan siapa pun itu.

Soal Ibu Kita Kartini memang beragam cerita dari domestik sampai publik, tetapi semangat pergerakan emansipasi dari Ibu Kita inilah yang harus terus menular dan menjalar merasuk ke *balungsumsum* perempuan NKRI. Bukan hanya masalah kerumitan keluarga, tetapi semangat juangnya untuk maju bagi kaumnya itulah yang mendorong R.A. Kartini menjadi teladan bagi kaumnya sebagai perempuan pengabdikan negara. Kelahiran R.A. Kartini, 21 April 1879 tepat di tahun Jawa 28 Rabiulakhir 1808, yang dalam perkembangannya ternyata bukan hanya suka menulis tetapi juga menanam pohon dan menjaga sumur keluarga. Menulis-pohon-sumur adalah bentara yang patut direnungkan di samping soal kemajuan yang diidamkan dalam pergerakannya. Menulis menjadi senjata utama perjuangan R.A. Kartini dan menanam pohon serta menjaga air sumur tetap bersih adalah sisi lain yang melambungkan ramah lingkungannya. Sumur pasti menyangkut pemenuhan kebutuhan masak, minum, mandi, dan sebagainya.

Semua ini menjadi tetirah sejarah yang menjalin rangkaian penjelajahan kita yang semakin menggugah semangat untuk selalu berupaya memberi kebanggaan kepada Jawa Timur dalam kepemimpinan yang penuh keramahan dari Pakde Karwo, Gubernur Jawa Timur dan Ibu Hj. Nina Soekarwo, yang dalam sapaan publiknya dilafalkan dengan Pakde Karwo dan Bude Nina Soekarwo atau singkatnya Bude Karwo.

F. SAVE EARTH DAN GERAKAN PERTANIAN ORGANIK

Tanggal 5 Juni setiap tahunnya telah disongsong dan dilalui dengan penuh semangat oleh para pengabdikan lingkungan di seantero dunia. Gerakan mereka beragam dari kota ke desa dan juga dari pelosok ke pusat-pusat kekuasaan di mana pun mereka berada. Hari-hari yang bersentuhan dengan lingkungan memberi rasa *kebungahan* (kegembiraan) yang besar di Jawa Timur, Pakde Karwo bersama ribuan (sekitar 25.000) para pengabdikan lingkungan yang sudi mengolah tanah dan mendeklarasikan diri sebagai *Petani Ramah Lingkungan*. Menemani dan turut serta dalam agenda kerjanya untuk membuat kompos maupun pupuk cair bagi kepentingan pertanian mereka, sungguh suatu kenyataan yang membanggakan. Petani ini berupaya membuat sendiri pupuknya dengan bahan dasar enceng gondok, ayola, bonggol pisang, kotoran ternak serta sebelas jenis bahan lainnya untuk diaduk bak adonan. Hasilnya tidak hanya menggembirakan dengan produktivitas panen tetapi sembuh tanah dari gempuran pupuk kimia yang puluhan tahun diterapkan. Ini telah menjadi modal bagi Jawa Timur menghadapi MEA dengan petani yang kreatif.

Tanah mengeras karena sudah sejak 1972 digelontor pupuk kimia dan pestisida



Pakde Karwo dan Ibu Nina Soekarwo di acara "Clean Up Brantas".

tanpa henti. Dan, kini petani telah berubah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mau mengawal perubahan ini dengan pertanian organik yang dimulai dari rakyat. Pemerintah yang berjalan sesuai dengan kebutuhan rakyatnya adalah pemerintahan yang menapaki *ihdinassiratal mustaqim* (jalan yang tepat). Pemerintah yang demikian lekatnya dengan kehendak rakyatnya sungguh sangat hakikiah keberadaannya secara demokratis. Petani dan pemerintah harus disambung dengan beragam cara. Jangan dilihat kecilnya peran petani tetapi niatnya saja untuk berubah demi kelestarian fungsi lingkungan sudah menjadi titik balik *back to nature* yang dibutuhkan alam. Totalitas gerakannya dalam bahasa leluhur yang berbahasa Kawi ataupun Sanskerta disebut *megilan*.

Megilan itu ungkapan syukur yang terlontar ekspresif nan membahana lambang berbahagia yang acap kali dikumandangkan. Apa itu makna kata *megilan*? Tentu ada banyak pandangan dan penafsiran yang beragam sesuai dengan situasi kebatinan yang



Pakde Karwo bersama ribuan petani di acara tanam pertama program pertanian ramah lingkungan KAPAL Jawa Timur, di Lamongan Jawa Timur.

melingkupi sebagaimana saat ini memasuki musim panen dan tanam raya. Era sekarang dinamakan mulai *wiwit* alias memulai untuk menanam bersama alam. Semuanya jelas semakin tampak *megilan*. Semangatnya petani yang terlayani menghadirkan aura yang *sumringah bungah* (gembira dalam artian bersyukur). Kenyataan demikian menjadi sangat semakna dengan kata *megilan* dalam kepustakaan



kamus-kamus Jawa Kuno ataupun bahasa Sanskerta yang terartikan: *gilan* itu *gumilan-gilan* atau *gilan-gumilan* yang akhirnya *megilan*, adalah bercahaya—berkilau-kilauan.

Dalam lingkup inilah *megilan* sejatinya telah menggambarkan suasana berpendarnya cahaya yang mencahayai atau semburatnya cahaya yang berkilau-kilauan. Cahaya melambangkan sumber energi bagi siapa saja yang terterangi dan kemilau adalah pertanda keberadaan hidup yang lebih baik. Hal ini menandakan bahwa secara kodrati perjalanan petani dengan berpanduan niatan bijaknya ramah lingkungan, merupakan langkah yang harus mampu memberikan cahaya terang dan kemilau tatanan kehidupan warga Jawa Timur maupun seluruh bangsa Indonesia. Inilah landasan dan garis pijakan kita semua untuk *ngancani* (menemani) petani untuk melanjutkan pengabdian bagi lahirnya tatanan yang berkilauan bagi warga yang lebih makmur. Bertani ramah lingkungan itu *megilan*, baik secara ekologis maupun yuridis sesuai dengan substansi regulasi di bidang pertanian berkelanjutan.

Kata *megilan* dapat pula diberi tafsir dari paduan kata *magic* dan *land*, sehingga menjadi *magic-land* dalam artian *tanah yang penuh keajaiban* (dan bukan tanah mistik-mejik). Bukankah setiap jengkal tanah di seluruh wilayah Nusantara adalah keajaiban bagi para pengabdian lingkungan? Dari tanah itulah kehidupan itu bermula dan berakhir. Dari tanah itulah semua berkat Tuhan terukir dengan rekam jejaknya. Terdapat hubungan yang membumi dan melangit di antara para petani maupun siapa saja yang sadar atas keberadaan *kahuripannya*. Tanah yang diolah dengan hati yang menggerakkan raga untuk bekerja sebagai tanda pengabdian diproyeksi akan menghasilkan beragam sumber makanan. Dari tanah dengan pancar airnya yang menyiraminya, tumbuh semua jenis hal yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Mengolah tanah dengan bahasa dan laku tanah tanpa merusaknya tetapi menjaganya, adalah anugerah. Tanah akan memberi keajaiban atas nama Tuhan. Tanah akan memberikan kemulyaan atas kuasa Tuhan.

Dengan demikian, *megilan* bagi petani diwujudkan bahwa tanah adalah tanah keajaiban yang dapat memberikan landasan serta cuatan untuk keberlanjutan kehidupan yang penuh keagungan Tuhan. Jawa Timur dan Indonesia dapat memberikan *berkat* yang dalam bahasa agama *berkah* pangan melalui tangan terampil warganya untuk selalu *ngramut-ngrumat-ngruwat* (menjaga) lahan-sawah maupun ladangnya. Apa yang tidak tumbuh di bumi Pertiwi? Padi, jagung, kedelai, kacang hijau, dan semua ragam *polo-*



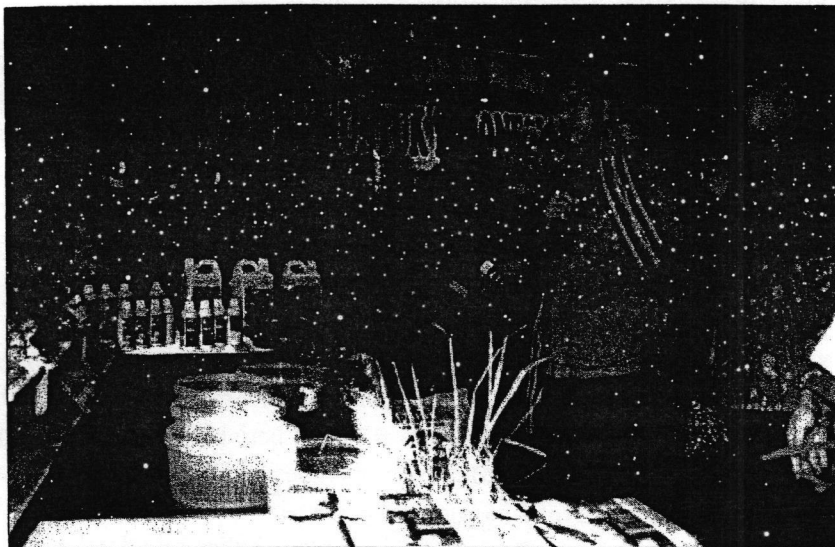
Petani KAPAL Jawa Timur bersama Bupati Lamongan Panen Raya Padi Ramah Lingkungan di sawah percontohan.

pendem (hasil bumi) serta pisang maupun ikan, semua dapat hidup nyaman. Indonesia itu tanahnya adalah bongkahan surga yang di dalamnya sungai mengalir jernih serta pepohonannya rindang dengan produk oksigen yang menyegarkan. Syukurilah dengan cara memelihara lingkungan dengan penuh kesungguhan cintanya, termasuk melalui bertani tanpa menyakiti Bumi ini yang lazim diumumkan dengan bahasa *Save Earth*.

Sesuai dengan data dari KAPAL dapat diketahui bahwa penggunaan pupuk produksi sendiri, yang dibuat sendiri, diolah sendiri, digunakan sendiri, dan menerapkan pertanian yang ramah lingkungan ternyata hasilnya sangat baik. Padi dan jagung yang ditanam tidak terkena hama serta produktivitasnya meningkat. Pada musim tanam I Tahun 2013 lalu, KAPAL telah melakukan penanaman dan panen beragam varietas padi dan jagung yang dikelola dengan menggunakan pupuk organik. Untuk varietas padi yang ditanam meliputi: mapan 02; DG1, DG2, Inpari13, Ciharang, dan IR64. Demplot percontohan di Desa Rancang Kencono Kecamatan Lamongan, lahan yang digunakan seluas 104.100 meter persegi (dari ketersediaan lahan 75 hektar), pada 2012 menghasilkan rata-rata 217.330 kg, telah meningkat pada musim panen pertama pada 2013 menjadi rata-rata 328.920 kg, naik 111.590 kg atau 47%. Hasil panen padi memang bergerak variatif, ada yang hasilnya meningkat 81%, 74%, 65%, 93%, 57%, 35%, dan lain sebagainya, bahkan ada yang meningkat 98%. Luas lahan 3.000 meter persegi, semula pada 2012 menghasilkan 13.000 kg, masa panen pada 2013 menjadi 25.000 kg, naik 12.000 kg. Hasil ini telah memberi harapan dan masa depan yang lebih baik dan maju bagi para petani untuk terus menggelorakan semangat untuk bertani yang ramah lingkungan pada



Pakde Karwo meresmikan gerakan perlindungan dan pengelolaan sumber mata air di wilayah suci, Jember.



Pakde Karwo menjelaskan kepada Wapres RI Boediono tentang Pupuk Ramal Lingkungan karya KAPAL Jawa Timur (2012).

2014 dan masa mendatang. Kegembiraan untuk bersyukur ini semakin semangat karena hasil pertambakan bandeng maupun nila dan ikan emas juga meningkat terus dengan cara menggunakan pupuk produk mereka sendiri.

Untuk pertanian jagung, KAPAL menerapkan pertanian ramah lingkungan dengan membuat Demplot Percontohan di beberapa Desa di Jawa Timur. Pada tahun 2012 pada musim panennya menghasilkan rata-rata 70.200 kg, pada masa panen musim tanam pertama tahun 2013 hasilnya 109.650 kg, rata-rata naik 39.450 kg, atau 44%. Varietas jagung yang ditanam meliputi NK33 maxPro dan Garuda. Petani yang menerapkan penanaman jagung ramah lingkungan dengan cara rawat dan pemupukan organik ternyata semakin baik hasilnya. Persentase kenaikan memang beragam dari 24%, 30%, 54%, 60%, 71%, meskipun ada yang naik 14%, tetapi juga ada yang meningkat 80%. Luas lahan 1.000 meter persegi yang semula hasilnya 1.000 kg, kini meningkat menjadi





Panen Raya Jagung Ramah Lingkungan karya pengabdian lingkungan KAPAL Jawa Timur.

1.800 kg, naik 800 kg, atau 80%.

Pada lingkup itulah saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur dan bertafakur dengan implementasi kerja tuntas bagi pengembangan sawah ladang sebagai *jodoh kehidupan*. Pertanian ramah lingkungan yang kini dibahasakan bertani secara organik merupakan pilihan tepat untuk menjaga sawah ladang tetap dalam kondisinya yang subur tanpa mencederainya. Pertanian ramah lingkungan adalah pilihan, dan soal pilihan itu ternyata sangat menentukan bagaimana kehidupan ke depan. Memilih bertani ramah lingkungan di era MEA sangat tepat meski terkadang berat dalam menjalankannya. Kami terus bertekad, seberat apa pun dan sesulit apa pun jalan yang harus dikembangkan untuk menjaga kesuburan tanah tanpa merusaknya, haruslah dilakukan. Mencoba melakukan dan selanjutnya meneguhkan pendirian bahwa bertani ramah lingkungan itu menguntungkan, sejatinya adalah panggilan pengabdian.

Dunia kampus harus turut mengawal dan mengomandani sebagai bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kampus turun ke kampung-kampung menemani petani adalah pilihan kebijakan yang harus terus didorong. Jangan biarkan petani berjalan sendirian. Kini pemerintah Jawa Timur yang *dipandegani* Pakde Karwo memberikan fasilitasi atas apa yang telah rakyat kerjakan untuk lebih bermakna lagi bagi penyelamatan lingkungan. Membangun dan menggelorakan semangat *go green* adalah dibutuhkan, bukan sekadar diinginkan.

Petani dengan segala pernik hidupnya harus dijadikan profesi yang bermartabat. Bertani tidak boleh dianggap sebagai pekerjaan rendahan. Jadi petani itu *ndeso* kata anak modern yang tidak tahu diri. Saatnya petani menata diri dan bangkit lebih mencintai profesinya. Sejatinya perlu upaya memberi sumbangsih dengan menjaga gairah bertani tetap tinggi dengan cara kalau panen bisa *mesem gemuyu* (tersenyum indah dan mengembang) dengan pupuk membuat sendiri dan digunakan sendiri meski masih sangat kecil. Dengan membuat pupuk dan bertani ramah lingkungan yang memerlukan ketahanan semangat adalah jalan yang mesti ditempuh untuk menjadi bangsa yang memiliki ketangguhan untuk bertani. Kapan petani menikmati dan diajari bertani yang tidak perlu pupuk kimia? Dibutuhkan gerakan kolektif menetapkan kebijakan bertani ramah lingkungan dengan mengembangkan pupuk organik. Itu tersadari bahwa pupuk hasil produksi industri pastilah mempunyai dampak lingkungan. Tanah yang banyak dipupuk kimia hanya berkesuburan instan dan pada akhirnya akan kering tanpa "gizi".



Sumber foto: birohumas.jatimprov.go.id

Demi kesehatan hasil produksi pertanian dan tanah-tanah pertanian, mari kita wujudkan pertanian yang berwawasan lingkungan. Tanpa sawah yang sehat tidak akan muncul produk pertanian yang sehat. Produk pertanian yang sehat hanya akan lahir dari para petani yang sehat yang kini bersemangat melakukan *gerakan pertanian organik dan meneguhkan diri sebagai petani ramah lingkungan*. Pakde Karwo telah melantik dan harus terus hadir dalam gairah pertanian ramah lingkungan. Lihatlah bagaimana program pertanian dikembangkan di Jawa Timur oleh Pakde Karwo dan ini tentu saja menjadi saka guru dalam MEA untuk bertani secara tangguh bagi warga Jawa Timur. Kehadiran Bank Tani yang didirikan Pakde Karwo dengan dukungan DPRD Provinsi Jawa Timur semakin memudahkan petani untuk akses permodalan.

Dari sini kita belajar. Semua pihak perlu merekonstruksi konsepsi dan paradigmanya bahwa bertani ramah lingkungan sebagai bagian dari sistem pengabdian kehayatan itu tepat, baik, dan bijak. Bertani ramah lingkungan adalah napas hidup dan kita tidaklah dapat bertahan hidup tanpa bernapas. Kapankah kita mau bersentuhan dengan kelembutan bersama dengan bertani ramah lingkungan? Sekali kita ayunkan dan meneguhkan langkah untuk bertani ramah lingkungan, maka Tuhan akan membalas jauh lebih dahsyat, lebih ajaib, lebih *megilan*. MEA 2015 menjadi sangat *historis sekaligus futuristik* dan kita dituntun memiliki kesiapan untuk itu.

G. DIBUTUHKAN OTONOMI YANG EKOLOGIS DALAM MEA

Abad ke-21 ini dalam pergaulan internasional dinamakan *green century*, alias Abad Hijau, suatu abad yang dipandu dengan pesan dan implementasi sangat ekologis dalam bingkai *sustainable development* sebagaimana disiapkan pada naskah *Agenda 21*. Persaingan dalam MEA juga tidak lepas dari pertimbangan lingkungan sebagai sentrum kebijakan dari pengembangan 12 sektor yang disepakati dalam MEA tersebut di atas. Hanya saja pada gelembung otonomi daerah di Indonesia pada umumnya publik telah disugahi realitas samping bahwa lingkungan kini tersandra politik atau sebaliknya, politik



dapat menjadi pemantik penyelamatan lingkungan dengan *green politics* yang maujud dalam *green policies* yang diproduksi negara. Era otonomi daerah telah menyuguhkan fakta mengejutkan, ternyata politik otonomi daerah berjalan paralel dengan tingginya tingkat degradasi lingkungan daerah. Selama ini banyak pihak yang terdiri para pakar, birokrat, dan publik telah berkumpul untuk berefleksi mengenai politik lingkungan pada tataran otonomi.

Kita mafhum bahwa politik otonomi daerah yang berjalan tentu saja tidak boleh hanya sekedar menandakan ada yang berubah yang membedakan dengan tata pemerintahan masa Orde Baru yang beralih ke orde yang dibilang Orde Reformasi. Orde sekarang ini tetaplah harus berpijak pada pandangan paradigmatis yang fundamental terhadap ide otonomi sebagai upaya untuk berijtihad secara komprehensif menata kehidupan kenegaraan yang lebih berkah. Politik otonomi harus dipahami dan diimplementasikan sebagai upaya strategis dan teknis untuk merajut penyelenggaraan pemerintahan yang selalu independen dalam batasan NKRI. Otonomi secara konseptual harus dikonstruksi untuk merancang bangun negara dengan segala sumber daya rakyatnya secara beradab. Peningkatan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat secara berimbang dengan tatanan *stakeholders* dan *stateholders* adalah pilihan tunggal yang harus dikedepankan. Otonomi hanya memiliki arti penting bagi rumah tangga NKRI dengan warga negaranya apabila membuat kehidupan kita lebih baik atau lebih mulia. Dalam bahasa Pancasila tentu saja politik lingkungan harus membuat kita semua hidup yang lebih: berketuhanan, berkemanusiaan, bersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Tanpa perkembangan kehidupan yang demikian, maka pelaksanaan politik otonomi harus terus dikritisi secara substantif.

Dalam kerangka tata kelola lingkungan memang terdapat kritik keras bahwa pelaksanaan politik otonomi daerah tidak membawa perubahan yang berbenah lebih baik. Degradasi lingkungan dan tingginya tingkat deforestasi serta destruksi ekologis yang semakin menggilanya terus diterima sebagai efek domino pelaksanaan otonomi daerah yang tidak berwawasan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Para petinggi pemerintah pusat dengan mudah menuduh bahwa kehancuran lingkungan hidup NKRI adalah sisi buruk otonomi daerah, sehingga hal ini menjadi argumen bagi mereka untuk menarik kembali sebagian besar kewenangan dari pemerintah daerah. Resentralisasi dianggap sebagian pihak sebagai solusi untuk menghentikan kerusakan lingkungan dan mencegah kualitas lingkungan yang terus memburuk. Sementara itu, pejabat pemerintah daerah ada yang beralih lebih pragmatis lagi bahwa selama ini pemerintah pusatlah yang menguras kekayaan alam daerah; dan kini saatnya kamilah orang-orang daerah yang menikmati sumber daya alam yang kami punya ini. Puluhan tahun pemerintah pusat mendominasi dan mengeruk kekayaan alam dengan beragam perizinan dan rezim kontrak karya pertambangan yang dipaksakan oleh pusat ke daerah. Saatnyalah sesi otonomi daerah ini menjadi ajang dimana orang-orang daerah mengenyam kenyamanan pundi-pundi ekonomi lingkungan yang menjadi SDA daerah.

Perdebatan tersebut tentu saja akan terus berkembang dan sangat merugikan kepentingan lingkungan. Untuk itulah yang dibutuhkan adalah politik lingkungan yang memformat lingkungan menjadi sentrum pembuatan kebijakan pembangunan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sama-sama memiliki satu visi, satu misi, dan satu aksi untuk menjadikan lingkungan sebagai variabel utama dalam menakar dan mengukur kinerja

pemerintahan. Lingkungan adalah titik terinti kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi ukuran paling rasional dalam membangun NKRI yang lingkungannya akan selalu lestari secara fungsional. Dinamika politik otonomi daerah pada ruang simpul yang harus tersepakati adalah jangan hancurkan lingkungan, karena tiada kehidupan tanpanya.

Terdapat paparan *simbolik-metaforik* dari R. Latta atas kondisi lingkungan kontemporer kita. Diungkapkan bahwa penduduk Perancis beriang gembira menggunakan teka-teki untuk mengajarkan kepada anak-anak sekolah tentang sifat pertumbuhan yang berlipat ganda. Sebuah *kolam teratai*, begitu teka-teki itu dimulai, berisi selebar daun. Tiap hari jumlah daun itu berlipat dua. Dua lembar daun pada hari kedua, empat pada hari ketiga, dan delapan pada hari keempat, demikian seterusnya. Kalau kolam itu penuh pada hari ketiga puluh, kapankah kolam itu berisi separuhnya? Begitu ditanyakan. Jawabnya adalah: "Pada hari kedua puluh sembilan". *Cangkriman* ini dirujuk pula oleh L.R. Brown dalam bukunya *The Twenty Ninth Day: Accomodating Human Need and Numbers to The Earth's Resources*.

Sudah dapat dipastikan secara prediktif bahwa kondisi *kolam teratai* Indonesia, kini mungkin sudah penuh seluruhnya, padahal waktu penyelamatannya tinggal sehari saja. Maka, semua pihak harus memahami urgensi kebutuhan memulihkan kualitas lingkungan di era MEA agar produk-produk Jawa Timur masuk dalam *eco-label*. Pencemaran lingkungan tampaknya tak kenal kompromi dan kerap meluas tiada henti melanda lorong-lorong lingkungan dengan rentetan kompleksitas konsekuensi yang problematik harus dihentikan. Malapetaka lingkungan mencapai titik krusial yang berdampak pada banyak aspek kehidupan. ASI mengandung logam berat Pb (timbal), penyakit ISPA meningkat, kematian premature menggejala, dan lain sebagainya. Realitas mengenai destruksi ekologis kini tidak perlu diragukan dan diherankan apalagi diperdebatkan. Kenyataan itu merupakan produk sikap pengabaian kolosal selama ini. Birokrasi nasional, sektoral dan daerah diharamkan melakukan "*systematic destruction*" terhadap lingkungan. Jawa Timur telah ambil prakarsa untuk membuat agenda kerja *Pro-Environment* dalam kepemimpinan Pakde Karwo.

Secara esensial kita membutuhkan bangunan kepemimpinan ekologia. Sebuah kepemim-

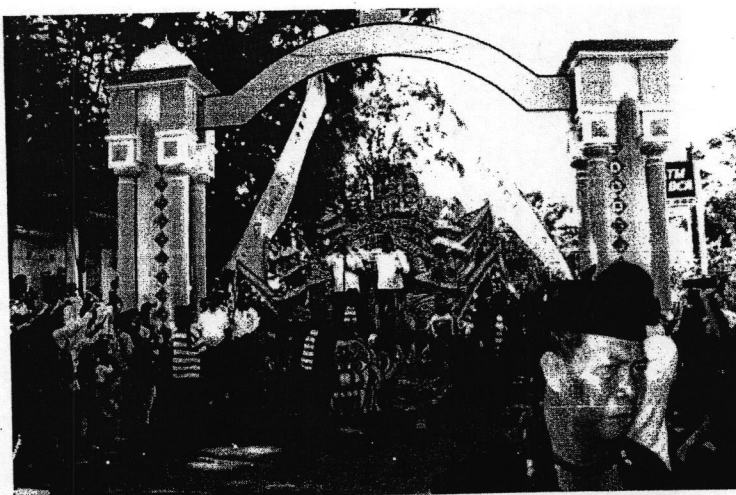


Penanaman pohon
oleh Pakde Karwo bersama
Bude Karwo di Desa Suci,
Jember

pinan yang sensitif terhadap krisis lingkungan. Kepemimpinan yang mempromosikan aktivitas akrab dan ramah lingkungan di Jawa Timur memang terus dikampanyekan oleh Pakde Karwo. Atas laku itu pada deret waktu berikutnya adalah telah memanen apresiasi dengan menerima “Penghargaan Asasta Buana Kepemimpinan Lingkungan Hidup”, 12 Oktober 2014. Kepemimpinan yang menetapkan dan menggelegakkan *public concern* terhadap upaya penyelamatan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan: membangun tanpa mencemarkan dan merusak lingkungan demi nasib generasi mendatang, adalah perlu dikawal serius oleh publik. Kepemimpinan ekologia mempersyaratkan pengetahuan kasuistik ataupun universal, penegakan hukum yang efektif dan kultur kelembagaan yang kondusif bagi tatanan “*eco-society*”. Betapa elegannya masyarakat yang *berlabel* lingkungan. Masyarakat yang mampu bertahan hidup tanpa memorak-porandakan prospek generasi penerusnya. Inilah substansi pembangunan berkelanjutan yang menuntun misi kepemimpinan ekologia.

Melalui kepemimpinan ekologia, terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi dan menggejala harus dapat dihentikan. Kelembagaan kepemimpinan lingkungan nasional yang kini berupa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH Kehutanan) harus diperkuat agar tidak menjadi si *macan ompong*. Sekeras apa pun *auman* macan ompong, tidaklah menakutkan, justru menggelikan dan dipermainkan. Anggota DPR-DPRD dan Kelapa Daerah juga menjadi titik sentrum pelaku politik dalam pembuatan kebijakan yang selayaknya memperhatikan mutu lingkungan hidup. Filosofi sederhana yang dapat dikatakan adalah bahwa *tidak ada kehidupan yang sehat tanpa lingkungan hidup yang sehat*. Menurut UUD 1945 diterangkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia Indonesia. Jadi lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian penting HAM rakyat Indonesia yang dijamin secara konstitusional sehingga UUD 1945 dikualifikasi dalam kedudukan *green constitution*. Untuk itulah negara melalui pemerintahnya berkewajiban untuk menyediakan mutu kehidupan warganya dengan memberikan jaminan atas kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dengan ini diharapkan semua pihak terutama yang menjadi aktor politik nyata,



Warga menyambut kehadiran Pakde Karwo di Probolinggo

harus menjadi “wali lingkungan hidup”. Kita harus optimis bahwa langkah yang diambil Pakde Karwo membangun komunikasi publik sebagai pijakan untuk menggulirkan isu lingkungan menjadi pusat perhatian pembuatan kebijakan daerah yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang telah menjadi kesepakatan dunia akan direalisasi dalam strategi pembangunan lokal yang diejawantahkan oleh para punggawa daerah. Kepala daerah terpilih yang sudah mendeklarasikan diri bervisi lingkungan sesungguhnya telah ikrar untuk siap-siap menjadi pembina lingkungan masa depan. Dalam konteks inilah lingkungan akan dijadikan sebagai poros utama pembuatan kebijakan untuk generasi sekarang dan mendatang di wilayahnya. Selamat terus berkarya kepala daerah yang berohani lingkungan dalam rangka penyelamatan negara republik tercinta.

Dalam kerangka MEA 2015, saya ingat bahwa, KLH pernah membuat Konferensi Hukum Lingkungan Berwawasan Budaya di Yogyakarta pada 12-13 April 2007 yang dihadiri akademisi, penegak hukum dan para budayawan maupun politisi “hijau”. Di sini didengungkan pentingnya hukum lingkungan dan para anggota parlemen yang hadir juga merasa betapa pentingnya menjaga lingkungan. Sebelumnya di Jakarta juga digelar helatan penting para *penggede* negara untuk mempersiapkan kematangan konsep alokasi tertentu bagi anggaran lingkungan. Semua agenda pada akhirnya mengerucut pada aspek pendanaan. Aspek ini sebenarnya klasik dan kita akan bangun suatu dana lingkungan yang harus dijembatani melalui pengaturan jasa lingkungan sebagaimana telah disinggung pada beragam regulasi. Konsep demikian secara sepihak banyak ditolak pengusaha yang tidak mengerti tentang pentingnya pelestarian fungsi lingkungan. Biarlah ia tetap bergulir dengan sendirinya dan pada ujung ceritanya semua pihak akan memahami bahwa ternyata jasa lingkungan adalah bagian dari aspek instrumen ekonomik pengelolaan lingkungan yang tidak terlalu memberatkan pengusaha.

Pengembangan jasa lingkungan secara finansial adalah kebutuhan. Di banyak negara maju hal ini telah menjadi salah satu jenis pembiayaan yang harus dituangkan dalam naskah APBN/D. Di samping itu, juga harus diberikan segmen khusus tentang pendapatan daerah yang berasal dari kepentingan pengelolaan lingkungan. Di Indonesia nomenklatur tentang sumber dan pengeluaran dana publik yang menyinggung aspek lingkungan memang beragam. Secara finansial sebagaimana yang terdapat dalam APBD sesungguhnya bangsa ini perlu terus belajar jasa lingkungan. Membuat APBD Hijau alias APBD yang menuangkan secara tegas sumber-sumber dana publik yang berasal dari upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pos pengeluarannya adalah langkah administratif bagi penyelamatan lingkungan secara finansial. APBD Hijau perlu segera diwujudkan bukan saja untuk mendorong peran publik dalam menggalang kekuatan kebijakan yang berwawasan lingkungan tetapi juga membuktikan bahwa para punggawa daerah memang sedang “jatuh cinta” kepada lingkungan.

Tentu membutuhkan pengawalan kita bersama. Pemerintah daerah dan DPRD dipersyaratkan juga perlu segera kerja keras dan tuntas. Kebijakan yang berbasis penataan ruang yang tepat harus segera diwujudkan. Kondisi berikut hendaklah menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak pemangku kepentingan tata kota yang berkelanjutan. Tidak ada titik-titik perkotaan yang tidak menyuguhkan suatu *tontotan dan tuntunan* yang tidak mengasyikkan. Paling tidak ya ... menyesakkan. Kota-kota dunia yang konon

dinamakan kota raya alias metropolitan sejak lama tergiring dan tergiur untuk menjadi kota-kota kematian yang disebut *nekropolis*. Simak dan sibaklah lembaran-lembaran perkotaan di Indonesia. Di banyak daerah sedang dipertontonkan sebuah drama kolosal tentang kematian kotanya. Kota dirasakan sedang sakit keras dalam kondisi yang menjengahkan. Jengah dan jenuh mewarnai warga kota. Perikehidupan di perkotaan terjelma seperti mesin-mesin kota yang berjalan sesuai dengan rute yang ditetapkan tanpa nalar keberlanjutan. Tidak ada daya imajinasi yang penuh humanisme (*kamanungsan*) yang mengakurkan sesama. Kota terkadang berjalan seperti jalannya “kuda liar”, meskipun penuh taman bunga.

Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini publik mengalami proses pelupaan identitas perkotaan dalam tingkatan yang menakutkan. Titik-titik simpul kota telah dikuasai oleh para pemeran utama kota dalam hitungan yang tidak terperikan. Semua sisi kehidupan perkotaan ini telah dihitung dalam kisaran harga jual yang jelas dan pas. Yakinlah bahwa ada orang yang membelanjakan hartanya melebihi kebutuhannya yang tentu saja tidak dapat mencukupi kerakusannya. Keinginan dan kerakusan sebagian warga menandakan dendang tembang tata uang. Inilah yang saya maksudkan bahwa di kota tidak ada tata ruang, yang ada adalah tata uang. Uang justru mampu menata ruang dengan benderangnya, saksikanlah toko *pracangan* (toko rakyat) yang terpinggirkan, bahkan tergerus hilang. Di sinilah ada tugas Pakde Karwo untuk memberi tuntunan kepada para bupati/walikota untuk menjaga wilayahnya dalam koridor yang sesuai dengan kebutuhan rakyat secara berkelanjutan yang tidak mengabaikan daya saing peradabannya. MEA jelas membutuhkan kota yang mempunyai daya saing dengan insan-insan yang berwatak ekologis.

H. UBAH PERILAKU UNTUK BERSAING DALAM MEA

Ubah Perilaku dan Pola Konsumsi untuk Selamatkan Lingkungan adalah tema yang dipilih dalam peringatan Hari Lingkungan Dunia, 5 Juni 2013. Tema ini senapas dengan tema yang dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup Dunia, *United Nations Environment Programme* (UNEP): *Think, Eat, Save*. Guna mengapresiasi tema demikian diselenggarakan survei atau jejak pendapat atau obrolan santai-serius yang hasilnya dipaparkan sekaligus dipamerkan ke publik yang intinya perilaku lingkungan masyarakat Indonesia rendah. Berbagai media massa memberitakan dan menuliskan apa yang dilontarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH saat itu) yang menyatakan bahwa dalam keseharian masyarakat Indonesia masih belum peduli kepada lingkungan. Diberitakanlah kalau hal ini dilihat dari hasil studi yang dilakukan KLH pada 2012, bahwa *Indeks Perilaku Peduli Lingkungan* (IPPL) masyarakat masih berkisar pada angka 0,57 dari angka mutlak satu. Indeks ini mengindikasikan bahwa masyarakat kita belum berperilaku peduli pada lingkungan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kenyataan ini harus dihapus dalam lingkup masa kini dan masa depan pada percaturan MEA. Publik semuanya harus bertindak laku yang ramah lingkungan dan itu tuntutan moral dalam MEA.

Dilanjutkan lagi bahwa perilaku konsumsi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sebanyak 49,3% berupa bahan makanan dari luar daerah mereka. Kondisi itu memberikan dampak lingkungan seperti meningkatnya emisi karbon kegiatan pengang-

kutan bahan makanan tersebut dari daerah asal ke tempat tujuan. Dari enam indikator perilaku: konsumsi energi, membuang sampah, pemanfaatan air bersih, pemanfaatan bahan bakar, penyumbang emisi karbon dan perilaku hidup sehat, nilai terburuk adalah perilaku pemanfaatan bahan bakar, yaitu level 0,28. Masih banyak lagi pernyataan yang mengungkapkan bahwa masyarakat kita memang kurang peduli lingkungan, baik yang dikeluarkan oleh lembaga akademik maupun institusi birokratik. Semua seolah membeber bahwa masyarakat belum peduli lingkungan.

Terhadap pernyataan itu maupun sebagian kampus yang mengungkap rendahnya perilaku ramah lingkungan masyarakat Indonesia biarlah menjadi kritik dan vitamin, agar semua pihak semakin peduli lingkungan. Semua pegiat lingkungan pastinya setuju bahwa perilaku ramah lingkungan harus dikonstruksi secara serius. Pernyataan atau berita yang menginformasikan (untuk tidak mengatakan yang menjelekkan) bahwa perilaku ramah lingkungan masyarakat Indonesia rendah tidak usah dibantah sambil berbasa-busa membuka mimbar demokrasi. Biarlah itu menjadi lecutan untuk masyarakat yang memang perilakunya memperhinakan lingkungan. Sementara itu bagi masyarakat yang sudah menjunjung tinggi kaidah etika dalam mencintai lingkungan teruslah melakukan pengabdian itu demi keberlanjutan ekologis yang lintas generasi.

Kita di sini memang berupaya terus membangun optimisme tanpa henti bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar juga banyak yang sangat ramah lingkungan. Hidupnya diabdikan betul untuk penyelamatan lingkungan. Bagaimana pengabdian lingkungan di Papua yang terus melindungi lingkungan dengan ubah eceng gondok menjadi pupuk organik secara tradisional. Hal ini juga dikembangkan oleh pengabdian lingkungan di Jawa Timur dengan sedikit sentuhan lebih modern mengolah eceng gondok dengan melibatkan teknologi mesin. Bagaimana pengabdian yang lulusan PTN ternama yang tampil kesehariannya sangat anggun ternyata sangat giat berkalang serabut kelapa, maupun tempurungnya yang diolah menjadi energi alternatif, di Batam. Pengabdian lingkungan di Kalimantan Timur juga semangat dan bangga mampu mengolah plastik menjadi BBM alternatif. Mereka belajar dari saudaranya, di Madiun dalam olah plastik melalui *Plastic Oil Destilator* menjadi BBM alternatif yang telah digerakkan oleh Pakde Karwo. Kita menemukan beragam Bank Sampah di Malang, Pasuruan dan lain-lain Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan omzet puluhan juta. Saudara-saudara kita para abang becak di Probolinggo mampu berperilaku ramah lingkungan dengan paguyubannya. Kita memiliki Pondok Pesantren An-Nuqoyyah Guluk-Guluk Sumenep yang mampu menyelamatkan sumber air di Sumenep Madura. Perbukitan Guluk-guluk dihijaukan jauh sebelum ada program Eco-Pesantren. Teman-teman tokoh kampus dan adat di Sulawesi Selatan telah melakukan penyelamatan sungai maupun melakukan perilaku ramah lingkungan berdasarkan hukum adat yang tertuliskan dalam lontara-lontara.

Kita juga dapat menyaksikan bagaimana Desa Mandiri Energi di Talangagung, Kepanjen, Malang dengan ubah perilaku bahwa sampah adalah berkah. Rumah mereka teraliri listrik maupun gas untuk memasak dari olah sampah. Hal demikian juga, dapat dilihat di berbagai kabupaten kota di Jawa Timur yang memang mendapatkan dukungan penuh Gubernurnya. Pembangunan hutan mangrove di Surabaya, Tuban, ataupun Lamongan dengan membentuk *Mangrove Center* adalah fakta untuk melanjutkan pengabdian yang harus dimengerti. Pegunungan Argopuro yang mampu mengalirkan sumber air di

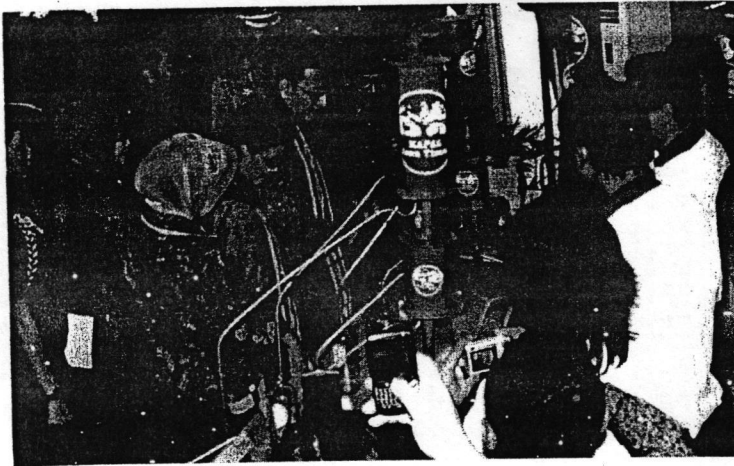
Pakde Karwo bersama Bude Karwo memberikan apresiasi kepada Pengabdian Lingkungan Madiun yang telah berhasil menciptakan mobil ramah lingkungan.



Jember, khususnya wilayah Desa Suci, Panti, adalah contoh lain lagi bahwa masyarakat desa telah mampu melakukan penyelamatan sumber air. Hal ini terlebih lagi dapat kita lihat bagaimana pengabdian lingkungan di Sanggar Hijau Desa Cowek, Pasuruan yang mampu menambah sumber airnya, baik debit ataupun jumlah sumber airnya. Lereng pegunungan Arjuno, Semeru, Baung, dan Mliwis terselamatkan oleh gerakan pengabdian yang kian hari kian membesar. Orang juga dapat menyaksikan peternakan yang koto-rannya menjadi energi alternatif yang sangat menguntungkan di Desa Tujur Pasuruan maupun di lereng pegunungan Panderman di Batu.

Memang pada mulanya hinggap pesimisme, tetapi dengan menyusuri wilayah Jawa Timur, kita harus ubah perilaku dan mendukung langkah-langkah Saudara kita untuk menyelamatkan lingkungan. Seperti telah disejarahkan bahwa sejak empat tahun yang lalu, di Pasar Induk Puspa Agro Jawa Timur dilakukan pengukuhan seribu pengabdian lingkungan yang tergabung dalam KAPAL. Pengukuhan dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo dan dihadiri oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya. Sungguh senang dan berbahagia seribu pengabdian saat itu, apalagi dihadiri pula seribu ibu-ibu Dasawisma dan ribuan undangan lainnya. Acara dihadiri sekitar 5.000 orang yang menjadi peserta maupun yang menyaksikan pameran lingkungan. Kehadiran Menteri Negara Lingkungan Hidup merupakan wujud kepedulian peran serta masyarakat dan saya mengucapkan terima kasih sekaligus rasa hormat. Terima kasih pula kepada Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup saat itu serta semua jajaran kedeputiannya termasuk Kepala Pusat Ekoregion Jawa. Khusus untuk Pakde Karwo, Gubernur Jawa Timur kami haturkan ucap takzim *matur nuwun* atas segala atensinya. Ini bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berbasiskan partisipasi masyarakat (*public-participation*) guna membangun lingkungan sesuai dengan kebutuhan lokalnya.

Sekadar diketahui bahwa KAPAL dalam lingkup kesadaran dan pergerakan lingkungan di Jawa Timur merupakan akronim dari *Kenduri Agung Pengabdian Lingkungan* (KAPAL) Jawa Timur. Gagasan ini muncul dalam perhelatan publik yang diusung oleh beragam komunitas lingkungan Jawa Timur yang diperhatikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kepemimpinan Pakde Karwo. KAPAL Jawa Timur menghimpun berbagai kolega



Wapres Boediono bersama Ibu Herawati Boediono menerima penjelasan dari Pakde Karwo tentang alat pencipta BBM Alternatif karya Pengabdian Lingkungan Madiun yang diberi nama POD (Plastic Oil Destilator).

atas nama kebersamaan dan persaudaraan dalam menata lingkungan. KAPAL bukanlah organisasi melainkan aksi yang ditopang oleh komunitas dan organ-organ lingkungan yang ada di Jawa Timur. KAPAL Jawa Timur memiliki cita dan harapan bagi pembangunan Indonesia yang diimpikan sebagai poros perubahan yang membawa kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan menampung pikiran-pikiran praksis para pengabdian yang mau terus mendedikasikan hidupnya bagi kepentingan lingkungan. KAPAL Jawa Timur pada akhirnya menjadi suatu langkah partisipatif yang berusaha menggelorakan semangat lingkungan bagi Jawa Timur untuk Indonesia yang bersih, hijau, dan biru.

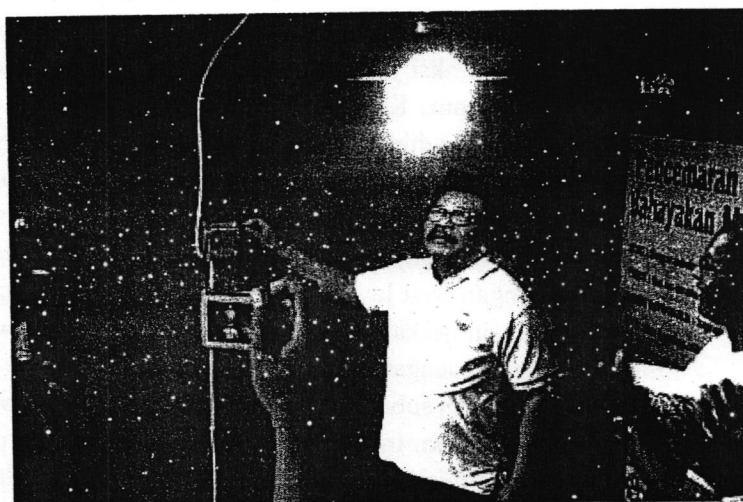
Indonesia bersih berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan warganya yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good-governance* yang berbasiskan Pancasila. Indonesia Hijau adalah substansi dari pengembangan wawasan kebangsaan yang peduli kepentingan ekologisnya. Indonesia Biru merupakan lambang perwujudan udara bersih yang disimbolkan dengan agenda kerja kolektif yang lazim disebut Program Langit Biru maupun lautan yang jernih membiru. Udara Indonesia harus bersih dan menyehatkan bagi generasi sekarang maupun mendatang dengan lautan yang membiru. KAPAL Jawa Timur sebagai perhimpunan para pengabdian lingkungan mencoba mengambil peran penguatan komitmen masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan bekerja sama dengan banyak pihak. KAPAL Jawa Timur bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan darma bakti dan tanggung jawab hidup dalam menjaga tatanan ekologis Indonesia yang baik dan sehat.

Kepemimpinan Pakde Karwo dalam makna lingkungan sesungguhnya memberikan kontribusi yang bermarwah bagi Jawa Timur dan Indonesia secara ekologis dalam spektrum gerakan damai masyarakat peduli lingkungan. Lingkungan harus menjadi parameter sekaligus variabel penentu setiap perilaku seseorang termasuk dalam pembuatan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam semua tingkatan. Penyelenggaraan berbagai kegiatan lingkungan di Jawa Timur pada titik yang paling simplistik adalah guna mengobarkan daya juang agar kita semua tidak menjadi asing bagi dirinya sendiri dalam belantara ekologisnya. Hidup bukanlah satu warna karena Tuhan tidak memainkan jemarinya dalam menguntai alam dalam satu rangkaian bunga yang seragam. Lingkungan Jawa Timur dan Indonesia pada hakikatnya mengejawantahkan pesan





Penanaman pohon di Mangrove Center, Jenu - Tuban.

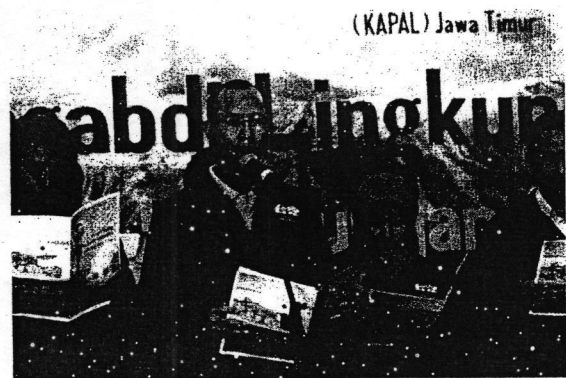
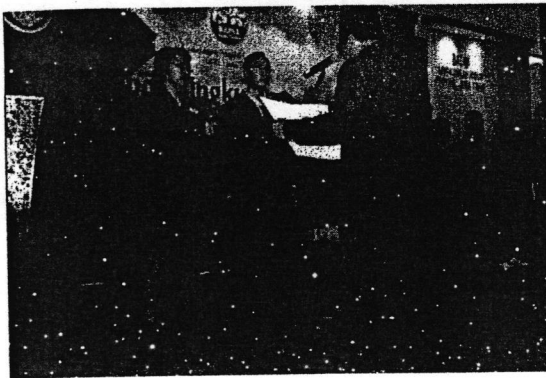
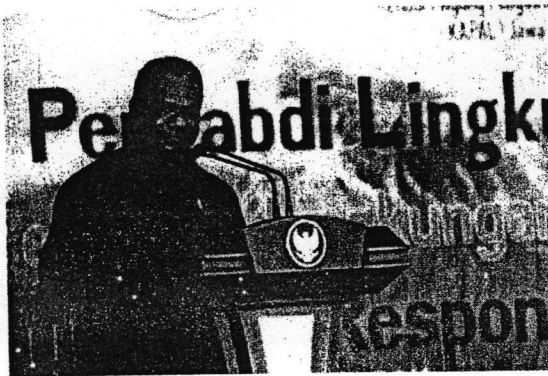


Sumber foto: desa.pkp2.com

Tuhan yang sangat fantastis mengenai jejaring lingkungan dan manusia pada bingkai yang harmonis dan seimbang. Para Pengabdian Lingkungan niscaya terdorong untuk turut memanggul peran meneguhkan komitmen bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.

Untuk langkah tersebut itulah dibutuhkan gerakan publik yang partisipatoris dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan lintas komunitas yang selama ini belum "dikendurikan" di Jawa Timur. Eksistensi dan fungsi KAPAL pada akhirnya akan diuji oleh zamannya dalam mengawal dan memberi prakarsa atas pelaksanaan program-program lingkungan yang benar-benar untuk kepentingan tatanan ekosistem Jawa Timur bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menteri Negara Lingkungan Hidup pada kesempatan tersebut menyatakan dengan terang bahwa KAPAL Jawa Timur akan dijadikan percontohan nasional bagaimana pelibatan masyarakat yang partisipatoris dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Wakil Presiden memberikan rasa salutnya. Kini KAPAL Nusantara hadir untuk menggelorakan apa yang dilakukan





Pengukuhan para pengabdian lingkungan oleh Pakde Karwo, dan dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup.

itu sebagai wujud pengembangan KAPAL Jawa Timur dan sungguh bangga atas capaian para aktivis lingkungan di seluruh Indonesia.

I. SAMBANG DESA KE KOTA MENUJU INDONESIA DI GERBANG MEA

Desa adalah awal

Maka kita menyambangnya

Karena kota telah jauh melupakannya

Kota adalah ruas kehidupan

Kenapa kau sesaki dengan pergudangan?

Kota adalah taman bunga

Kenapa kau werdikan sebagai lahan pertokoan dan perparkiran?

Kota adalah ritme persemaian peradaban berkelanjutan

Kenapa kau hiasi dengan nisan-nisan perbelanjaan

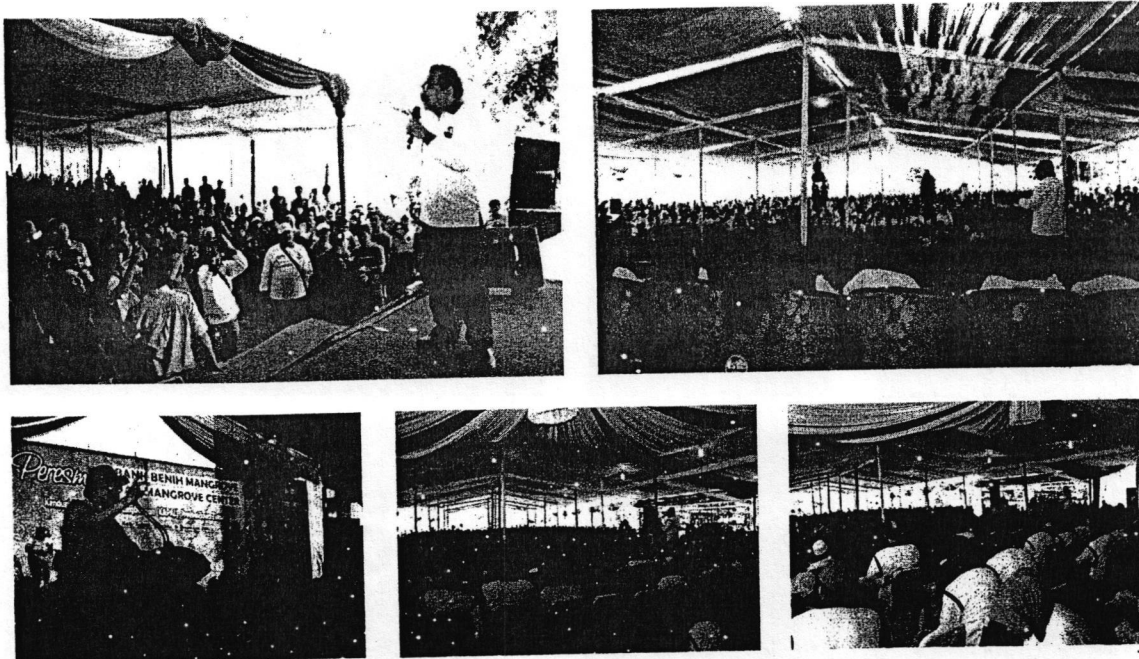
Kau rias dengan kembang-kembang iklan?

Kenapa?

Itu dulu tempo waktu

Bukan ini hari atau untuk esok yang menunggu



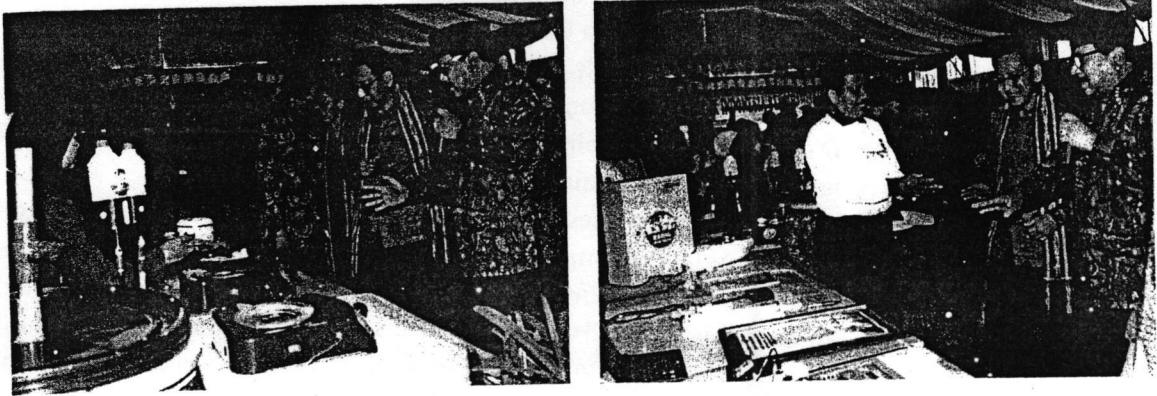


Ribuan warga dan pengabdian lingkungan di berbagai daerah Kabupaten di Jawa Timur bersama Pakde Karwo.

*Pakde Karwo hadir menyapamu
Menggelorakan bangunan jiwa raga Indonesia yang bersih, hijau dan biru
Meneguhkan kota sebagai tempat berlabuh dan berteduh
Kota hijau itu perlu bagi kita sampai anak cucu
Saat ini ataupun esok waktu.*

Selama kepemimpinannya Pakde Karwo mempunyai kebiasaan dalam menjalankan pemerintahannya dengan *Sambang Desa*. Bagi warga Jawa Timur hal ini melambangkan konstalasi gerakan yang selalu berkeliling untuk bersanding dalam memandu rakyat dari jejak-jejak desa ke kota menuju pelataran yang lebih besar, yaitu Indonesia. Warga Jawa Timur terpanggil dan siap terus mengabdikan untuk mewujudkan tatanan perkotaan yang hijau secara ekologis dengan ekosistem Nusantara yang berorientasi kemaritiman, sekaligus pertanian yang ramah lingkungan. Gerakan ini didasari oleh suatu realitas historis bahwa kota-kota raya yang suka “membusungkan dada” dalam bingkai metropolitan-megapolitan sesungguhnya telah menjadi korban aksiomatik pembangunannya sendiri.

Kemajuan yang dinisbatkan dalam terminologi “pembangunan” acap kali menggerus peradaban perkotaan pada tingkat yang mencemaskan. Terhadap hal ini kita teringat perkataan cerdas dan tegas Khalid Fazlun dari *Islamic Foundation for Ecology and Environmental Science*, England, UK yang mengungkapkan bahwa *progress* (kemajuan) telah menghasilkan *pollution* (pencemaran) dan pembangunan (*development*) identik dengan kerusakan (*destruction*). Tegas *cekak ausnya* (singkat-padat): P (*Progress*) + P (*Development*) = P (*Pollution*) + D (*Destruction*). Inilah yang sebenar-benarnya “tragedi kolektif perkotaan” yang sedang melanda kehidupan bernegara yang tidak boleh



Pakde Karwo bersama Wapres RI Boediono meninjau hasil karya ramah lingkungan pengabdian lingkungan Jawa Timur.

terjadi di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Pelangi ekologia maupun sosiokultural perkotaan terkoyak atas nama “kemajuan” sebagai bagian derap langkah pembangunan yang abai pada kepentingan lingkungannya. Dan, itu tidak akan terjadi di tanah kita apabila kita terus selalu bersama dalam gerakan berbasis perdesaan.

Siapa pun yang peduli dengan keberlanjutan sebuah desa dan kota harus berancang-ancang mewujudkan bangunan entitas taman surga (*“garden city”*). Di kala Alex Wilson c.s. meniuip “seruling” integrasi antara ekologi dan *real estate* melalui “pendulum” *green development*, Pakde Karwo secara aplikatif merengkuh *green city* (kota hijau) di semua desa di Jawa Timur. Semua pihak hampir mau mimpi indah yang sama tentang *garden city-green city* dan dipastikan sedemikian khawatir atas terjadinya evolusi perkotaan yang semakin lama semakin kehilangan “jiwanya”. Tentu kita semua membutuhkan bukti klasik-historik itu.

Simaklah dengan cermat dan mawas diri apa yang sedang berputar dalam rumpun sejarah perkotaan. Kota-kota modern yang disebut *metropolitan* seolah-olah bergeser dengan kencangnya menuju poros *megapolitan* untuk berubah wajah menjadi “entitas negara” yang lazim dinamakan *ecumenopolitan*. Fase ritmis-historis perkotaan ini pada akhirnya tertambat juga di ujung cerita sebagai *nekropolitan* alias kota kematian. Memang warga kota dalam derajat tertentu sepertinya sedang antri untuk membeli tiket kematiannya dan rame-rame diperlakukan seperti barang “sisa rampasan perang” yang hendak disantap untuk selanjutnya “diwaris dan dimakamkan secara massal”. Kota berubah “peran kesejatiannya” yang tak ubahnya seperti “pekuburan umum” bagi warganya. Inilah yang tengah melanda kota-kota di dunia sepanjang rotasi periodisasi “penggelembungan harga” eksistensi dan fungsinya sebagai habitat “akhir zaman”.

Sejujurnya dapat dikatakan bahwa semua itu (yang dialami kota-kota metropolis) tidak hanya melanda Indonesia tetapi juga tergelar di negara-negara lain (maju). Kenyataan tersebut agaknya sudah mewabah dalam skala global. Mengikuti informasi dari Eko Budihardjo (alm.), bukankah Chicago telah dilecehkan dengan sebutan “*sickago*” dan Frankfurt dijuluki “*krankfurt*” alias kota yang sakit. Indianapolis diberi nama ledekan “*india-no-place*” karena tidak adanya *sense of place*. Ini adalah sebuah parodi kenaifan yang melanda metropolis untuk terjun bebas menjadi nekropolis. Pada tataran

demikian terungkitlah bahwa udara yang kita hirup ini tidak lebih dari “*parfum beracun*” karena tingginya tingkat pencemaran udara. Air minum yang setiap hari kita konsumsi tak ubahnya “*sirup kimia*” dan tanah yang kita injak seolah meradang tangis menjadi “areal pesta para penyamun perkotaan”. Para pencemar sedang mengepung seluruh segmen *kampung-kampung* metropolitan dan para pengabdian lingkungan niscaya wajib menularkan pengabdiannya kepada siapa saja yang mencintai negeri ini.

Kini kota telah “dipatenkan” sebagai “kamar raksasa” yang dihiasi dengan gedung-gedung tinggi yang dicipta tanpa memedulikan nuansa alamiah lingkungan dan budaya setempat. Hutan kota tertentu telah diganti dengan hutan beton yang tidak mampu menyerap emisi gas buang, kemudian karena ada perilaku yang berubah untuk mengembalikan kembali fungsi hutan kota. Taman kota berubah wajah menjadi taman iklan dan seakan-akan meneguhkan pengalihgunaannya sebagai “makam kota”. Pasar-pasar tradisional digerus dan dilempar jauh dari gelanggang kota. Pasar rakyat terkikis dan digeser ke liang lahat oleh roda perdagangan dengan atribut *mall-mall* yang kian *memolak-malikkan* (menjungkirbalikkan) daya hidup warga kota melalui “anak ajaib” yang dinamakan *Trade Centre* dan *Minimarket-minimarket* yang melindas *pasar krempyeng* atau *pracangan warga* dan *anak-anak zaman ini*. Kota tampil kian ganas membombardir warganya dengan lamunan-lamunan konsumtif dan *mejang*. Belanja pun mesti menjadi gaya hidup dengan segala kemewahannya. Pemerintah akhirnya terpenggil untuk melakukan penyelamatan meski ada juga yang tidak beranjak untuk membenahinya. Menggeliatnya gerakan membangun *green house*, *green office*, *green building* adalah putaran arus kesadaran global yang kian menancap pada tingkatan lokal.



Hangat bersama ribuan warga; Pakde Karwo Sambang Deso ke pelosok Jawa Timur.

Marilah membangun kota lingkungan dan berperikemanusiaan bahwa di antara kita adalah “saudara setumpah darah” yang tidak ingin ada dusta. Jangan ada lagi kekerasan di kota-kota kita dalam bentuk apa pun, termasuk imajinasi “kasar pada lingkungan”. Kenapa kita tega memakan dan menyantap dengan riangnya “hak sesama warga” secara ekologis? Kenapa kehidupan perkotaan menjadi sedemikian kanibal dan saling memangsa? Kita adalah manusia yang *berhati sanubari* sebagai karya agung *Sang Khaliq*, sehingga sewajarnya kita membangun kota yang humanis dan ekologis. Lebih dari itu, selamatkan pula wilayah desa dan kota dengan mengembalikan ke *fitrahnya*. Kota dibangun dengan tata kota yang harus berbasis situasi ekologis. Banyak pemikiran dan gagasan yang dapat disitir, misalnya saja George F. Thompson dan Frederick R. Steiner telah mengajarkan mengenai hal ini dalam bingkai *ecological design and planning*. S.E. Jorgensen, B. Halling-Sorensen, dan S.N. Nielsen dengan kesungguhannya mau memberi arahan tentang tema-tema *environmental and ecological modeling*. Bahkan *regulasi nasional* berikut perangkat pelaksanaannya juga memformulasikan rambu-rambu penataan ruang kota secara yuridis.

Harus disadari sesadar-sadarnya bahwa lingkungan telah menjadi dimensi penting dalam konstruksi kota berkelanjutan (*sustainable city*) dengan lahirnya Kota Hijau (*green city*). Warga kota di mana pun tidak mungkin dapat hidup dengan prima dari udara yang tercemar, air yang kotor, ataupun tata kota yang tidak estetis. Warga suatu wilayah yang hidup bersahabat dengan air, udara, dan tanah yang tercemar sesungguhnya memberi sinyal bahwa mereka tengah “ditakdir” berinkarnasi menjadi “fosil-fosil” kehidupan. Kemajuan kota pada akhirnya harus menjadi “berhala persembahan” bagi warganya atau sebaliknya warga tengah dibopong menjadi “tumbal” kotanya sendiri. Untuk itulah membangun Kota Hijau yang bergaransi *ecopolis* dengan mengembangkan kebutuhannya merupakan tuntutan “jelajah perkotaan” ke “tanah yang diperjanjikan”. Kota-kota yang “bermunajat” di “altar” aspek lingkungannya inilah dalam spektrum konsepsi kota-kota berkelanjutan dikualifikasi sebagai bagian integral *cities of tomorrow*. Kota Hijau adalah sebuah kondisi tata sistemik untuk mengembangkan kehidupan perkotaan yang penuh rahmah bagi kepentingan kolektif yang berbasis lingkungan.

Kita semua pada hakikatnya harus mampu merancang bangun sebuah tempat hidup di mana semua “anak gembala” dapat hidup menjadi peranti dasar dari *ecopolis*. Jiwa rohaniah wilayah yang berperikemanusiaan, berkarakter lingkungan, dan memiliki hukum yang baik (“*good legislation*”) tidaklah mungkin serta-merta kita serahkan kepada para *pihak tertentu* yang telah disindir dengan terangnya dalam Deklarasi Johannesburg tentang Pembangunan Berkelanjutan (“*Johannesburg Declaration on Sustainable Development, 2002*”) melalui untaian kata wicara “*as nothing more than sounding brass or tinkling cymbals*”, ya ... “tong kosong (memang) nyaring bunyinya”. Marilah *cancel tali wondo* (satukan tekad) membangun Desa Konservasi dan Kota Hijau dengan berpanduan pada nilai-nilai keabadian hidup yang berupa: kemanusiaan dan lingkungan dan koridor Illahiyah secara serentak untuk mengembangkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi tanpa mengabaikan langgam budaya lokal. Inilah kearifan nenek moyang kita (“*local wisdom*”) yang diorientasikan untuk kota masa depan.

Warga Jawa Timur bersama Pakde Karwo, Gubernur Jawa Timur kini semakin menggelorakan semangat untuk membangun Jawa Timur dengan pedoman tatanan

lingkungan dan kerakyatan secara integral. Publik telah melakukan *Pencanangan Gerakan Kota Hijau dan Penguatan Penjaga Pesisir Jawa Timur* oleh Gubernur Jawa Timur di Kota Probolinggo tahun lalu dengan ribuan orang yang menghadiri acara tersebut. Keguyuban dan kepesertaan dalam berpartisipasi mengelola lingkungan patut menjadi contoh bagi para pengabdian lingkungan. Sajak itu dan waktu-waktu mendatang hal ini telah memberikan banyak energi untuk kita pancarkan bagi kebangunan Indonesia yang gemilang.

J. MEMILIKI ECOLOGICAL INTELLIGENCE SYARAT MEMIMPIN ERA MEA

Dinamika internasional untuk dapat berdaya saing hebat (dalam MEA) menuntun kita untuk berhasil membangun *civil society* dan mengembangkan *eco-society* demi kepentingan pelestarian lingkungan yang harus terus didengungkan. Para pemimpin di samping memiliki kapasitas kecerdasan intelektual yang paripurna dengan derajat *emotional intelligence* (kecerdasan emosional) dan *spiritual intelligence* (kecerdasan religius) yang mapan, juga perlu bekal kecerdasan lingkungan. Kita semua percaya bahwa para pemimpin sangat kuat untuk mengonstruksi kecerdasan lingkungan bagi terbangunnya *eco-society*. Pelaku politik pasti menyadari bahwa ternyata kecerdasan emosional dan spiritual saja tidak cukup untuk mengubah Indonesia lebih baik. Maka para psikolog (lingkungan) sekelas Daniel Goleman menawarkan ukuran baru perilaku seseorang yang dinamakan *ecological intelligence*. Lingkungan harus menjadi parameter sekaligus variabel penentu setiap perilaku seseorang. Orientasi ekologis adalah cermin pembulat kecerdasan emosional dan spiritual. Orang yang memiliki *ecological intelligence* akan memosisikan diri pada lingkungan secara ekosistemik yang terintegrasi dengan sikap hidupnya (*ecologists*). Mengotori lingkungan haram hukumnya secara politik. Begitu kira-kira dalilnya.

Pemimpin modern yang berwawasan lingkungan sekarang ini harus diapresiasi dengan segala implikasinya terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menyodorkan tiga pilar keseimbangan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perkembangan demokrasi yang menawarkan agenda politik semacam

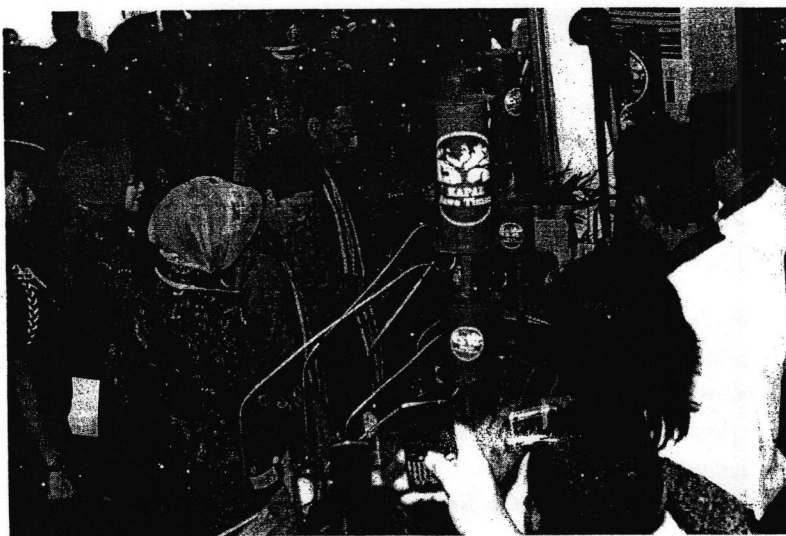


Pakde Karwo bersama Bude Karwo melakukan penanaman pohon sebagai wujud pelestarian sumber mata air di wilayah Desa Suci, Jember - Jawa Timur.

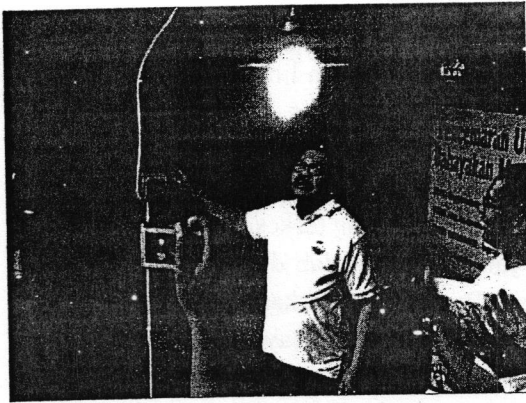
pemilu dapat mengkhawatirkan secara ekologis berupa limbah alat peraga kampanye yang berjajar dari Aceh sampai Papua. Kontestan yang tidak ramah lingkungan dalam bahasa yang hiperbolik dapat mengguncang tatanan ekologis Indonesia. Dan, inilah yang harus kita sikapi dengan mengembangkan *green-campaign* daripada *black-campaign*.

Simak dan saksikanlah bagaimana pertandingan demokrasi waktu pileg maupun pilpres 2014 lalu. Lorong-lorong publik dijejali dengan tanda gambar yang terkesan angkuh dan egois. Bukankah kita bisa membuat pesta pilpres yang lebih beradab dengan panataan kota dan desa yang etik dan estetis secara ekologis. Para capres berkampanye dengan menanam pohon, bersih-bersih sungai, pungut sampah, misalnya, niscaya merefleksikan kecerdasan sosial, emosional, keagamaan, sekaligus ramah lingkungan. Kita mesti paham bahwa gambar yang terbuat dari plastik (pola lama) sangat membahayakan keberlanjutan lingkungan kalau tidak dimanfaatkan ulang. Plastik itu hanya dapat didaur oleh alam secara naturalis dalam rentang waktu 100-120 tahun. Plastik tanda capres-cawapres 2014 baru terurai sekitar tahun 2134. Betapa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menetralisasi beban Pilpres 2014. Waktu seabad lebih tentu bukan waktu yang singkat. Berapa miliar ton sampah plastik yang harus ditimbun di rahim Ibu Pertiwi akibat pilpres yang abai terhadap kepentingan lingkungan?

Penyelenggara negara saatnya memberikan pengaturan yang terqualifikasi dalam gerakan *go-green*. Momentum pemilu dapat menjadi ajang pembelajaran lingkungan yang baik. Pemilu harus menjadi ajang munculnya politisi hijau yang mengharuskan proses daur ulang alat peraga kampanye, di samping soal perlindungan sumber daya alam (SDA) serta menata kembali eksploitasi SDA oleh korporasi transnasional yang jauh dari makna Pasal 33 UUD 1945. Kita mesti memiliki kesepakatan kolektif dari yang paling sederhana, yaitu mewajibkan kita semua menggunakan bahan nonplastik yang dengan mudah dapat didaur ulang oleh alam atau siap memanfaatkan ulang alat plastik yang ramah lingkungan. Hal ini secara personal membutuhkan kemauan untuk berbuat ramah lingkungan. Publik harus dapat mengukur secara simplistik tentang kecerdasan ekologis para pemimpin.



Wapres RI Boediono bersama Ibu didampingi Pakde Karwo menyaksikan hasil karya Pengabdian Lingkungan, Madiun yang berhasil membuat POD (Plastic Oil Destillator) sebagai pembuat BBM alternatif yang bersumber dari limbah plastik air mineral.



Pakde Karwo menyalakan lampu dari energi olah sampah di Talangagung, Kepanjen, Malang.
Sumber foto: desa.pkp2.com

Kita semua mafhum bahwa kecerdasan emosional dan spiritual saja tidak maton untuk mewujudkan *good environmental governance*. Dengan paradigma kecerdasan lingkungan berarti jalannya kehidupan yang sudah terlanjur memakai plastik akan dikumpulkan untuk diterapkan 3R (*reduce-reuse-recycle*). Atau yang pernah dilakukan oleh Pakde Karwo bersama warga Jawa Timur olah sampah yang menguntungkan secara ekonomi di mana plastik dengan POD (*plastic-oil-destilator*) yang diciptakan oleh teman-teman SMKN di Madiun, diubah menjadi BBM alternatif. Kita semua dapat menjadi pelopor gerakan ramah lingkungan dan berkoalisi untuk hal semacam ini yang dalam gagasan David Stra-

ker: kita harus melakukan *"the quality conspiracy"* demi keselamatan ekologis Indonesia. Ajakan ini bukanlah *"game of language"* melainkan pembaruan perilaku individual dan institusional yang bijak terhadap lingkungan. Tidakkah publik nanti mampu memilih pemimpin yang benar-benar teladan lingkungan dalam ucap dan perbuatan? Berpaling pada pikiran inspiratif John Plender: bukankah ini *"a stake in the future"* bagi Indonesia di gerbang MEA?

K. DENGAN MEA TERUSLAH MENYAPA

*Setelah sekian lama merayakannya
Bersaat-saat pesta kau hajatkan
Hanya sedikit waktu berjeda untuk menahan lapar dan dahaga
Mengira hidup tanpa pemberhentian*

*Manusia telah lama bergembira menguras semesta
Bertindak berlebihan terhadap alam: digelar tanpa lelah
Belajar mengingatkan tahu dirilah meski sebentar saja
Agar sejarah tidak mandeg dan gerah*

*Kini wajib mengerti bahwa kita telah beranjak ke lahir batin diri
Hari ini semua bersaksi tidak ada nista lagi
Berdaya saing semerbak mengitari jiwa yang suci
Lihatlah halal bi halal alam yang dihelat menyertai
Sebagai penanda hidup saling mengerti*

*Adakah kita saling bersimpuh menyapa?
Lupakan salah sesama
Karena Tuhan menyodorkan ampunan
Membentanglah jalan MEA yang menyerta
Sesama warga negara adalah saudara
Bukankah kita memang satu keluarga Indonesia dan dunia?*



Pakde Karwo di acara Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Gresik

Sebagai catatan kecil saja perlu diketahui bahwa di Jawa Timur banyak yang tinggal untuk berkreasi maupun belajar dari warga seluruh pulau di Indonesia dari Aceh sampai Papua. Mereka banyak bersinggungan dan saling mengenal, terutama dengan Pakde Karwo yang pernah menyematkan Selempang Persaudaraan dengan mahasiswa asal Papua yang belajar di Jawa Timur. Maka secara ekologis maknawi saya teringat filosofi masyarakat Suku Amungme yang telah dikenal luas dalam ungkapan "*Te Aro Neweak Lamo*". Ungkapan ini sangat familier sekaligus menunjukkan tingkat magis yang luar biasa. Suatu penggambaran hubungan yang tiada batas antarwarga Papua dengan hamparan tanah dan menjulanginya gunung yang kaya raya. Inilah gambaran surgawi yang semuanya akan tertegun bahwa surga yang dilukiskan dalam Kitab-kitab Suci itu terefleksi dalam bentara Papua. "*Te Aro Neweak Lamo*" yang berarti "Alam adalah diriku, Aku adalah Tanah" sebagaimana dituliskan dalam buku *Quo Vadis Papua* yang ditulis oleh putra Papua, Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi. Leluhur Jawa mengajarkan pula tentang *memayu hayuning bawono*.

Dengan ungkapan itu telah terkisahkan berderet cerita, berjajar pelajaran, dan bertumpuk legenda serta berpendar teladan atas relasi yang sangat ritmis antara warga dan tanah kelahirannya, tanah tumpah darahnya dalam bahasa yang heroik-hiperbolik. Tanah yang telah memberikan banyak keajaiban surgawi dengan keragaman serta kilauan sumber pangannya. Kesadaran tertinggi yang dapat dipetik dari ungkapan termaksud adalah bahwa Papua misalnya adalah Alam Pemberkatan yang harus dijaga, dirawat, dan terus disyukuri tanpa henti untuk memenuhi kebutuhan seluruh anak negeri. Warga Papua tidak kekurangan apa pun dari apa yang terkandung di Tanah Pemberkatan itu. Maka, kalaulah sekarang ada yang menggerus, ada yang mencuri, ada yang menambang tanpa reklamasi, ada yang mengambil hak yang lain, ada yang membuat derita dan sengsara di mana warga Papua justru tidak menikmatinya, pasti ada yang salah dalam manajemen kekayaan alam, manajemen keanekaragaman hayatinya, ada yang harus ditata ulang dalam Bumi Papua. Mengenai hal ini sejatinya bukan hanya di Papua tetapi di banyak tempat di Indonesia yang amat kita sayangi ini.

Dunia mengakui betapa hebatnya negeri ini, betapa hebatnya Indonesia ini. Negara yang bernama Indonesia adalah negara yang memiliki mega keragaman yang sempurna. Tiada tanding dan tiada banding dalam makna yang paling spesifik. Bahwa Indonesia memang mempunyai keragaman dalam setiap sisinya: politik, ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Bahkan ini sesuai *act of God* dalam mencipta semesta dengan segala isinya, adalah beragam pada titik keseimbangan. Dalam Kitab Suci acap kali kita dapat menemukan bahwa alam Kuciptakan dengan keseimbangan yang paripurna dan tidak akan ditemukan ketidakseimbangan dalam setiap kreasi-Ku. Begitu Tuhan selalu menyuarakan pesan agung-Nya.

Secara teologis dapat dipersaksikan dengan kuasa Tuhan bahwa Indonesia dicipta beratributkan keanekaragaman hayati yang dahsyat. Negara harus bersyukur dan memberikan perlakuan yang terbaik bagi karya Tuhan itu. Ini adalah rahmat besar yang dimiliki bangsa Indonesia dan menjadi kekayaan yang dapat dikelola sebagai energi untuk berlaga di MEA. Sudah diniscayakan apabila negara memberikan proteksi bagi pengembangan keragaman hayati yang beraneka itu akan positif dampaknya bagi masyarakat di gelanggang MEA. Warna dan jenis spesies yang ada di Indonesia sangat berwarna dan beragam. Ini benar-benar indah, sehingga dapat dikatakan betapa indahnya keanekaragaman itu dalam membangun kehidupan di Ibu Pertiwi ini sebagai potensi daya saing dalam MEA. Untuk itulah disahkannya *Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol To The Convention on Biological Diversity* sebenarnya sebuah langkah wajar bagi Indonesia, termasuk lahirnya *Undang-undang No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protokol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefit Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* merupakan penguatan yuridis. Inilah Protokol Nagoya, sebuah protokol mengenai akses pada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Inilah simbol negara yang ikut bertanggung jawab dalam mengamankan keanekaragaman hayati bersama-sama dengan masyarakat dunia. Komitmen internasional yang tertuang dalam Protokol itu disambut baik oleh Indonesia yang memang secara teologis telah menjadikan negara ini sebagai karunia dan rahmat Tuhan. Bukankah setiap regulasi nasional kita yang berbentuk undang-undang dijunjung dengan sebutan



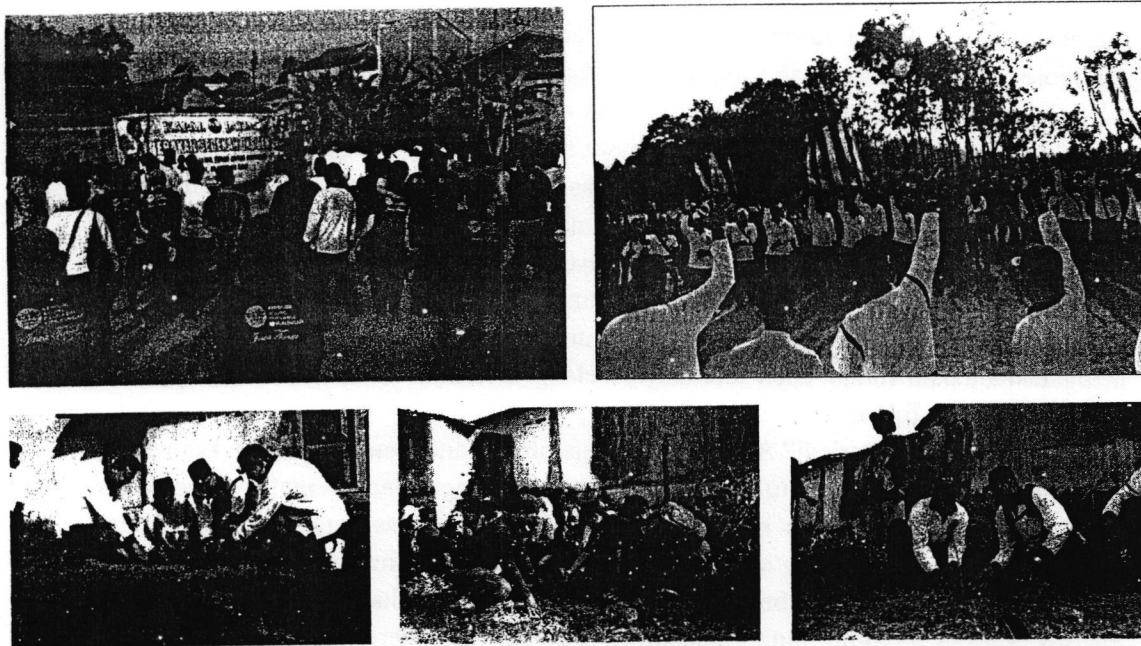
Pakde Karwo menyematkan selempang persahabatan kepada Pengabdian Lingkungan Papua.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah pertanda bahwa dimensi spiritual dan teologis sudah merambah sampai pada takaran regulasi. Hukum lingkungan pun di Indonesia membawa nama Tuhan. Hal ini berarti termasuk dalam pembentukan hukum keanekaragaman hayati telah membawa-bawa nama Tuhan. Pastinya hal ini menjadikan bangsa Indonesia tidak akan mencederai kreasi Tuhan. Negara sepantasnya tidak akan mengoyak janjinya. Pemerintah sewajarnya tunduk dalam bingkai ketuhanan untuk melindungi keanekaragaman hayati. Ekosistem dijaga dalam tata keseimbangan yang dipagar oleh hukum negara yang membawa-bawa nama Tuhan. Dengan demikian, melindungi keanekaragaman hayati adalah perintah hukum yang dikuatkan sebagai perintah yang mengatasnamakan Tuhan. Oleh karenanya, melanggar hukum di Indonesia sesungguhnya melanggar garis Tuhan.

Namun apa yang terjadi? Ada lembaran sejarah di mana menghancurkan keanekaragaman hayati dianggap sesuatu yang wajar dengan pandangan yang sangat antroposentris. Lingkungan dijarah dengan keserakahan yang melebihi batas-batas toleransi. Hutan dibabat seakar-akarnya yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum. Keanekaragaman hayati jangan-jangan akan bergeser menuju keseragaman hayati. Apabila ekosistem dirusak, spesies dibunuh, hutan dibabat, air dicemari yang berdampak buruk bagi biota air, satwa dibantai untuk santapan manusia tanpa kendali, maka tunggulah bahwa keseragaman hayati itu bukanlah ilusi melainkan menjadi fakta yang tidak terbantahkan lagi. Akankah kita bergerak menuju keseragaman hayati? Tentu saja jawabnya tidak agar Indonesia benar-benar tetap berwarna dengan segala keindahannya pada panggung MEA. Penegakan hukum adalah tonggak penting untuk menyelamatkan posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati paling masyhur di seantero jagat ini. Maka warga Jawa Timur semangat dengan Program Pakde Karwo yang juga peduli pada *Gerakan Konservasi Hutan Desa*. Membangun dan merawat hutan yang ada di desa-desa di Jawa Timur untuk tetap terlindunginya keanekaragaman hayati mutlak dilanjutkan, apalagi pada periode sejarah MEA.

Menjaga keanekaragaman hayati adalah sangat penting. Hal ini penting bukan saja telah diatur hukumnya, tetapi dapat juga dengan merujuk pandangan James Canton dalam bukunya yang paling populer *The Extreme Future*, karena:

- Keanekaragaman hayati penting bagi kesehatan manusia. Sepuluh dari obat-obatan paling laris di dunia yang memerangi mulai dari bakteri sampai kadar kolesterol tinggi berasal dari sumber-sumber alami. Obat-obatan masa depan untuk penyakit-penyakit seperti kanker akan hilang jika kita tidak menghadapi tantangan ini.
- Tahun 2050, dengan sembilan miliar mulut yang harus diberi makan, produksi pangan mungkin tidak akan bisa memenuhi permintaan global, sehingga melahirkan kemiskinan, kelaparan, dan konflik yang tambah parah.
- Keamanan global didasarkan pada ketahanan ekologis serta sistem sosial. Lima ekosistem utama: pertanian, terumbu karang, hutan, sumber air bersih, dan padang rumput akan mendapat ancaman serius.
- Kelangkaan air bersih di masa mendatang akan memperpanas konflik global antarnegara, khususnya ketika perubahan iklim mempertinggi angka pemanasan global.



Konservasi Hutan Desa "Gerakan Sedekah Oksigen" bersama masyarakat di Desa Pagu, Kabupaten Kediri.

Untuk itulah bagi beliau, masa depan keanekaragaman hayati perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh, mengapa? Inilah potretnya:

- Ada sekitar lima belas juta spesies yang hidup di planet bumi—termasuk manusia—yang kini tengah terancam.
- Keanekaragaman hayati adalah kepunahan spesies-spesies makhluk hidup dan dampaknya negatif bagi masa depan manusia.
- Makin cepatnya kepunahan spesies-spesies makhluk hidup dikarenakan salah urus manusia terhadap ekosistem global.
- Pertanian, pertumbuhan populasi, eksploitasi hasil laut, polusi dan pemanasan global membunuh spesies makhluk hidup dengan kecepatan yang amat mengkhawatirkan.
- Pada 2050, dengan pertumbuhan lebih dari 20 mega-kota dengan sepuluh hingga dua puluh juta penduduk, tingkat kepunahan tersebut akan mengancam eksistensi manusia di beberapa wilayah di dunia.
- Keanekaragaman hayati mempercepat perubahan iklim.
- Lebih dari 75 persen spesies ikan yang ditangkap akan terancam punah akibat penangkapan berlebihan sehingga mengancam persediaan pangan.
- Lebih dari 60 persen terumbu karang berada di ujung tanduk, mengancam keselamatan hidup jutaan orang.
- Luas hutan hujan tropis dunia makin menurun, menyebabkan pemanasan global dan kerusakan habitat.

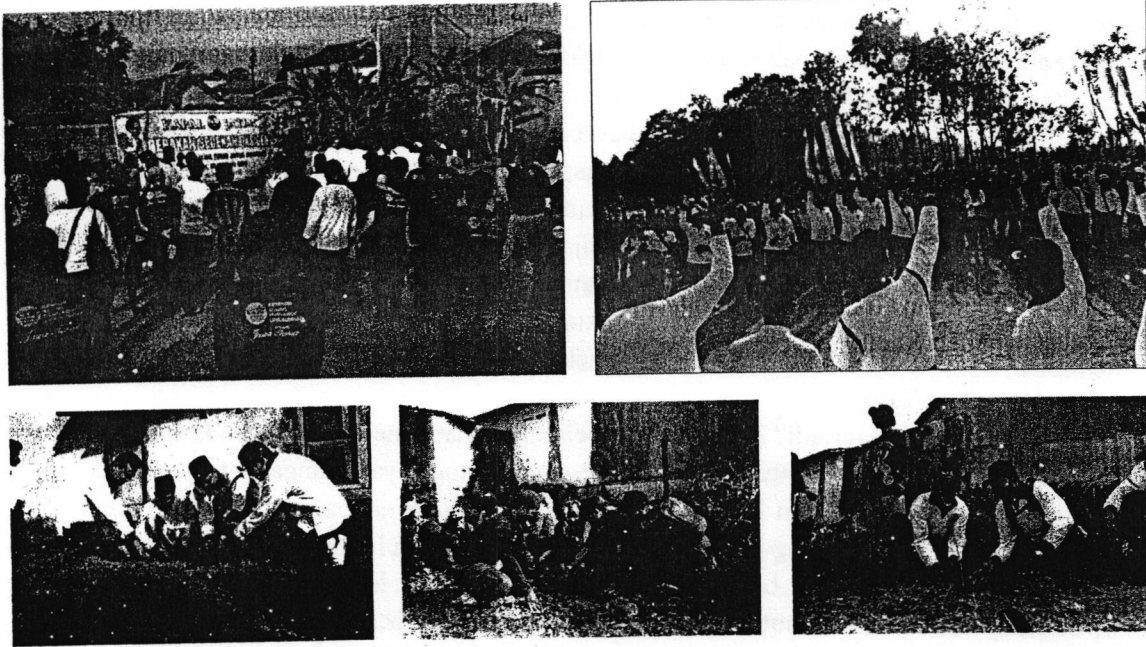
Apa yang ditulis James Canton mungkin masih sangat spekulatif meski melalui tahapan pengkajian yang panjang. Akan tetapi, itu dapat menjadi bahan penting dalam

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah pertanda bahwa dimensi spiritual dan teologis sudah merambah sampai pada takaran regulasi. Hukum lingkungan pun di Indonesia membawa nama Tuhan. Hal ini berarti termasuk dalam pembentukan hukum keanekaragaman hayati telah membawa-bawa nama Tuhan. Pastinya hal ini menjadikan bangsa Indonesia tidak akan mencederai kreasi Tuhan. Negara sepantasnya tidak akan mengoyak janjinya. Pemerintah sewajarnya tunduk dalam bingkai ketuhanan untuk melindungi keanekaragaman hayati. Ekosistem dijaga dalam tata keseimbangan yang dipagar oleh hukum negara yang membawa-bawa nama Tuhan. Dengan demikian, melindungi keanekaragaman hayati adalah perintah hukum yang dikuatkan sebagai perintah yang mengatasnamakan Tuhan. Oleh karenanya, melanggar hukum di Indonesia sesungguhnya melanggar garis Tuhan.

Namun apa yang terjadi? Ada lembaran sejarah di mana menghancurkan keanekaragaman hayati dianggap sesuatu yang wajar dengan pandangan yang sangat antroposentris. Lingkungan dijarah dengan keserakahan yang melebihi batas-batas toleransi. Hutan dibabat seakar-akarnya yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum. Keanekaragaman hayati jangan-jangan akan bergeser menuju keseragaman hayati. Apabila ekosistem dirusak, spesies dibunuh, hutan dibabat, air dicemari yang berdampak buruk bagi biota air, satwa dibantai untuk santapan manusia tanpa kendali, maka tunggulah bahwa keseragaman hayati itu bukanlah ilusi melainkan menjadi fakta yang tidak terbantahkan lagi. Akankah kita bergerak menuju keseragaman hayati? Tentu saja jawabnya tidak agar Indonesia benar-benar tetap berwarna dengan segala keindahannya pada panggung MEA. Penegakan hukum adalah tonggak penting untuk menyelamatkan posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati paling masyhur di seantero jagat ini. Maka warga Jawa Timur semangat dengan Program Pakde Karwo yang juga peduli pada *Gerakan Konservasi Hutan Desa*. Membangun dan merawat hutan yang ada di desa-desa di Jawa Timur untuk tetap terlindunginya keanekaragaman hayati mutlak dilanjutkan, apalagi pada periode sejarah MEA.

Menjaga keanekaragaman hayati adalah sangat penting. Hal ini penting bukan saja telah diatur hukumnya, tetapi dapat juga dengan merujuk pandangan James Canton dalam bukunya yang paling populer *The Extreme Future*, karena:

- Keanekaragaman hayati penting bagi kesehatan manusia. Sepuluh dari obat-obatan paling laris di dunia yang memerangi mulai dari bakteri sampai kadar kolesterol tinggi berasal dari sumber-sumber alami. Obat-obatan masa depan untuk penyakit-penyakit seperti kanker akan hilang jika kita tidak menghadapi tantangan ini.
- Tahun 2050, dengan sembilan miliar mulut yang harus diberi makan, produksi pangan mungkin tidak akan bisa memenuhi permintaan global, sehingga melahirkan kemiskinan, kelaparan, dan konflik yang tambah parah.
- Keamanan global didasarkan pada ketahanan ekologis serta sistem sosial. Lima ekosistem utama: pertanian, terumbu karang, hutan, sumber air bersih, dan padang rumput akan mendapat ancaman serius.
- Kelangkaan air bersih di masa mendatang akan memperpanas konflik global antarnegara, khususnya ketika perubahan iklim mempertinggi angka pemanasan global.



Konservasi Hutan Desa "Gerakan Sedekah Oksigen" bersama masyarakat di Desa Pagu, Kabupaten Kediri.

Untuk itulah bagi beliau, masa depan keanekaragaman hayati perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh, mengapa? Inilah potretnya:

- Ada sekitar lima belas juta spesies yang hidup di planet bumi—termasuk manusia—yang kini tengah terancam.
- Keanekaragaman hayati adalah kepunahan spesies-spesies makhluk hidup dan dampaknya negatif bagi masa depan manusia.
- Makin cepatnya kepunahan spesies-spesies makhluk hidup dikarenakan salah urus manusia terhadap ekosistem global.
- Pertanian, pertumbuhan populasi, eksploitasi hasil laut, polusi dan pemanasan global membunuh spesies makhluk hidup dengan kecepatan yang amat mengkhawatirkan.
- Pada 2050, dengan pertumbuhan lebih dari 20 mega-kota dengan sepuluh hingga dua puluh juta penduduk, tingkat kepunahan tersebut akan mengancam eksistensi manusia di beberapa wilayah di dunia.
- Keanekaragaman hayati mempercepat perubahan iklim.
- Lebih dari 75 persen spesies ikan yang ditangkap akan terancam punah akibat penangkapan berlebihan sehingga mengancam persediaan pangan.
- Lebih dari 60 persen terumbu karang berada di ujung tanduk, mengancam keselamatan hidup jutaan orang.
- Luas hutan hujan tropis dunia makin menurun, menyebabkan pemanasan global dan kerusakan habitat.

Apa yang ditulis James Canton mungkin masih sangat spekulatif meski melalui tahapan pengkajian yang panjang. Akan tetapi, itu dapat menjadi bahan penting dalam

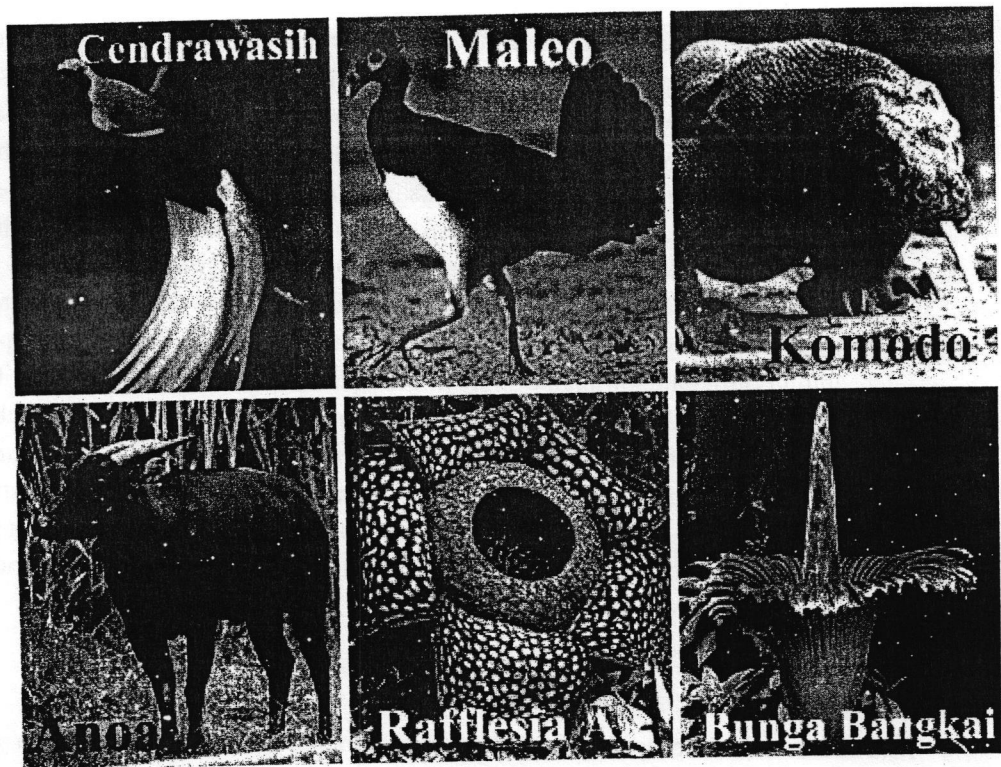
memberikan koreksi diri bagi bangsa Indonesia untuk menyelamatkan posisinya sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi. Hal ini tidak lepas dari kemampuan kita yang sudah mau melakukan perlindungan keanekaragaman hayati. Berbagai produk hukum yang sangat protektif terhadap aspek keanekaragaman hayati telah kita buat. Kini tinggal bagaimana dilaksanakan dan ditegakkan bersama-sama masyarakat internasional. Sebagai tanda syukur atas karunia keanekaragaman hayati yang kita punya, Indonesia harus menjaga komitmennya sepenuh hati. Kalau tidak sekarang, kapan lagi. Bukankah kita tidak menghendaki adanya keseragaman hayati? Karena keseragaman hayati merupakan pertanda memburuknya kualitas hidup. Jaga dan selalu wujudkan keanekaragaman hayati sebagaimana aslinya di Tanah Air Indonesia. Ingatlah pesan terdalam dari pandangan hidup Saudara kita di Papua tersebut di atas, renungkanlah falsafah Suku Amungme: *“Te Aro Neweak Lamo”*—*“Alam adalah Diriku—Aku adalah Tanah”*. Bacalah dengan keteguhan hati: *Aku adalah bagian inti keanekaragaman hayati—dalam kata keanekaragaman hayati ada Aku*, agar kita selalu menyapa lambang peradaban paling asali, yaitu alam semesta ini secara lebih spiritual di tengah persaingan global di MEA.

L. MEA ITU HALAL BI HALAL ASEAN

Kita sudah terbiasa berpuasa dan ada pelajaran menarik di setiap bulan puasa secara ekologis-teologis yang menyemangati daya saing di MEA. Bulan puasa mensejajarkan bentang hidup untuk menerima tanda jeda atas perintah agama. Dalam Al-Qur'an surah *al-Baqarah*, 183 dinyatakan: *Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa*. Ayat ini membentangkan gairah sejarah untuk bersambung antargenerasi manusia yang kini terkonsepkan dalam jargon: *intra-generational equity* dan *inter-generational equity*. Genetika manusia dan sumber keimanan telah dibalut penuh pesan ketakwaan yang membuktikan bahwa sejarah peradaban sedang digulirkan dengan pelajaran berpuasa. Puasa telah diwajibkan pada umat yang berbilang lampau dan yang disebut kini dengan pengertian untuk melakukannya tanpa kecuali asal beriman. Inilah titik sambung antara yang lama dan yang mendatang dibingkai dalam yang berkekinian. Waktu zaman kemarin diajarkan berpuasa dan waktu kini terwajibkan melakukannya untuk merangkai pada kehidupan mendatang yang meneguhkan esok waktunya sebagai sambungan takwa. Puasa itu dapat diterjemahkan muara pelatihan daya saing yang kurikulum ketuhanan dan kemanusiaannya jelas.

Itu sudah menjadi penanda bahwa Tuhan telah mengajarkan kepada hambanya di mana antara yang lampau dan yang akan datang bersatu dalam jiwa sekarang. Proses perangkaian kehidupan terjadi secara niscaya dan dari puasa kita mendapatkan ilmu atasnya. Manusia mana yang tidak mengambil pelajaran tentu sedang abai pada tataran atmosfer hidupnya tanpa berpikir atas kuasa Tuhan. Ini baru urusan zaman sebagai episode yang menahapkan hidup itu sambung-menyambung berkelanjutan dengan peristirahatannya Tuhan sendiri yang menentukan.

Sesungguhnya periodisasi dalam kewajiban puasa adalah wujud halal bi halalnya sejarah sang waktu. Waktu lampau dan waktu yang akan datang berhalal bi halal di waktu



Sumber foto: Indonesia Heritage, Margasatwa.

sekarang ini dengan produk insan takwa. Maka esok itu yang dibungkus agenda MEA adalah kesempurnaan yang seharusnya menyejarah setelah melalui permaafan pelajaran berpuasa. Inilah yang saya pahami bahwa waktu pun sebenarnya juga berhalal bi halal atas dirinya. Kalau masa kini tidak memaafkan masa lalu, maka tidak ada masa depan yang terkonstruksi dengan sempurna. Dendam waktu akan menyisakan kebencanaan berupa hilangnya harmonisitas sejarah. Dan, ternyata ayat Tuhan yang menyatakan itu sudah cukup bagi kita untuk selalu bersimpuh pada kuasa-Nya dengan terminologi takwa.

Apa yang tidak berhalal bi halal dalam semesta ini? Kosmologi alam mengajarkan-nya bahwa ekosistem itu niscaya berhalal bi halal secara maknawi. *Matahari, bumi, dan bulan yang menghiasi tata surya sejatinya berhalal bi halal.* Matahari halal mengitari porosnya tanpa diganggu bulan maupun bumi, begitu sebaliknya sang poros halal menjadi telunjuk peredaran sang butiran tata surya. Saturnus, Venus, Uranus, Mars, dan sejuta-semiliar-setriliun bintang yang terus bertambah setiap harinya selalu berhalal bi halal sehingga tidak terjadi hantaman yang mengkiamatkan alam raya. Mereka halal atas apa yang ditakdirkan kepadanya oleh yang Maha Mentakdirkan. Tanpa halal bi halal di antara komponen tata surya niscaya tidak ada keseimbangan itu. Maka tidak heran kalau Tuhan selalu bertanya dengan penuh aksentuasi sebagai wujud uji materi atas keimanan manusia: adakah kau temukan ketidakseimbangan dalam ciptaan-Ku? Bacalah ayat-ayat mengenai penciptaan langit dan bumi, mengenai hujan dan mata air, mengenai matahari dan bulan, mengenai malam dan siang, mengenai keragaman hayati yang spektakuler. Tentu bukan maksud Tuhan sedang tidak tahu dan membutuhkan

informasi dari makhluknya dengan berbagai pertanyaan dalam ayat-ayat kuasa-Nya. Itu hanyalah *pasemon*, hanyalah pertanyaan yang mempernyatakan bahwa kuasa-Nya telah ditata sedemikian seimbangannya untuk kehidupan ini. Semua ada dalam *maqom* halal bi halal. *Semua elemen alam itu berhalal bi halal*. Anggaplah MEA adalah wujud kita berhalal bi halal sesama di kawasan ASEAN.

Simaklah pula bahwa tanah *berhalal bi halal* dengan semua jenis jasad maupun pepohonan. Kalaulah tanah tidak halal terhadap tanaman yang menyertainya, pastilah tidak ada kehidupan. Bumi acap kali berhalal bi halal atas apa saja yang menimpa atasnya, meski sangat menyakitkan. Andai bumi enggan berhalal bi halal: Tanaman tidak tumbuh, makanan tidak ada, oksigen tidak terpenuhi, akhirnya hidup tidaklah mesti adanya. Pohon yang memproduksi oksigen dan mengembuskan udara yang sehat pastilah halal oksigennya kita hirup dan kita juga menghalalkan diri agar mereka mengirup luapan napas insaniah kita. Matahari halal menyodorkan cahayanya kepada semua tanaman, tumbuhan, pepadian, dan setiap hal yang hidup dalam bingkai gerak fotosintesis alam. Antar-anggota tata surya yang terumpun dalam koridor planet-planet yang jauh di luar angkasa, semua berhalal bi halal dalam panduan ajaran Tuhan. Tentu halal bi halal sebagaimana makna tekstualnya yang sumrambah dalam kancah sosial berwujud saling memaafkan.

Matematika itu terkristalisasi karena halal bi halalnya angka-angka. Setiap angka menyajikan kerelaannya untuk berjajar dalam saf-saf yang menandakan pangkuan Tuhan dan mewujudkan akhir dari perjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau apa pun namanya. Setiap angka harus menghalalkan dirinya dapat bersembahyang bersama angka lainnya. Inilah jamaah angka itu yang menghasilkan kebersamaan di antara para angka. Huruf-huruf pastilah berhalal bi halal sesamanya. *Tanpa mau berhalal bi halal maka huruf akan tinggal huruf, huruf akan sekadar huruf tanpa makna*. Huruf dapat merefleksikan bunyi atau menggambarkan segala hal yang terjadi, karena huruf diantara jajaran keluarga besar mereka dapat berhalal bi halal. Halal bi halal menyatukan mereka yang berserak termasuk manusia pastinya. *Siapa berhalal bi halal akan menemukan arti hidupnya*. MEA memperluas cakupan *halal bi halal* kita sebagai pribadi maupun bangsa di rumpun Austronesia.

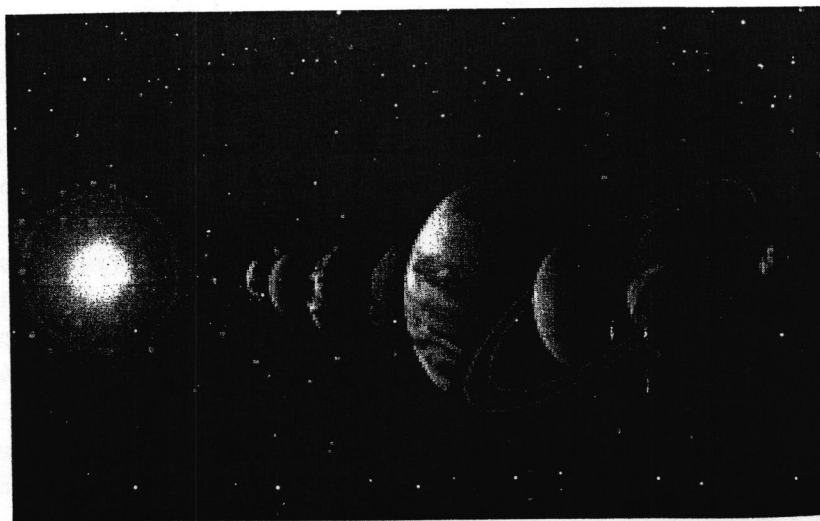
Dalam makna lingkungan pastilah hanya dengan halal bi halal akan ada keberlanjutan yang menjamin alam tidak dinafikan. Kita memahami kenapa dunia mengambil tema peringatan Hari Lingkungan Dunia pada 2014 kemarin itu menawarkan gerakan berkaitan dengan penyatuan langkah melindungi ekosistem pesisir dari dampak perubahan iklim. Memang masalah *global warming* dan *climate change* pada abad ke-21 telah menyentak kesadaran masyarakat dunia. Pemanasan global dan perubahan iklim yang dalam tradisi leluhur dirangkai dalam bincangan *pranoto mongso* selalu menorehkan pesan bahwa memahami rotasi iklim adalah kebutuhan. Tatanan ekosistem laut maupun pesisir senantiasa mendapatkan perhatian sebagai sumber protein. Fakta bahwa kerusakan ekosistem hutan, lahan kritis, konversi kawasan konservasi, pencemaran laut, meningkatnya permukaan air laut, dan semua perilaku masyarakat yang menggelisahkan dewasa ini dengan tampilan yang liar, sesungguhnya sudah cukup untuk menyatakan bahwa dampak buruk krisis ekologis ini membutuhkan solusi tanpa henti, tanpa jeda, tanpa menunggu komando lagi.

M. ASASTA BUANA KEPEMIMPINAN LINGKUNGAN DALAM MEA

Publik telah mengikuti dengan antusias dan meresponsnya secara beragam atas prestasi kerja Pakde Karwo. Buku ini memberikan gambaran mengenai hal tersebut. Pada saat penyusunan buku ini, sorotan publik terarah ke pengumuman struktur Kabinet Presiden Terpilih Bapak Ir. H. Joko Widodo-Drs. H. Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pada mulanya kita memahami gerak gesitnya kerja Tim Transisi Jokowi-JK untuk menata pemerintahan ke depan yang diagendakan ada perampingan kabinet dengan implikasi praksis termasuk yang bersentuhan dengan KLH. Diberitakan oleh berbagai media massa pada mulanya bahwa KLH hendak dibubarkan atau dimerger dengan kementerian lain meski hal itu masih teka-teki yang kini KLH dan Kehutanan. KLH tidak untuk dihapus atau dimerger melainkan diperkuat keberadaannya. Bukankah Pasangan Presiden Terpilih Jokowi-JK telah mengusung tema lingkungan untuk diperhatikan dengan kesungguhan jiwanya. Pasangan ini memang memanggul amanat untuk melindungi lingkungan dengan jargonnya Indonesia Hebat, yang seyogianya menggelorakan *green spirit* guna mewujudkan *good environmental governance* dengan kelembagaan lingkungan nasional yang berwibawa.

Masalah kelembagaan lingkungan memang memiliki konsepsi historis yang merentang sebagai tanda bahwa dunia sangat peduli atasnya. Perhatikanlah bagaimana hal ini dibincangkan sejak era Deklarasi Stockholm (1972) maupun Johannesburg (2002). Kami tahu bahwa pada 26 Agustus–4 September 2002 di Johannesburg diselenggarakan “*The World Summit on Sustainable Development*” (WSSD) yang menghasilkan Deklarasi Johannesburg dan menegaskan kembali pentingnya pembangunan berkelanjutan sebagaimana disepakati pada “*The United Nations Conference on Environment and Development*” (UNCED) tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro. Dalam “*Plan of Implementation*” WSSD pada bagian “*Strengthening institutional frameworks for sustainable development at the national level*”, angka 145 pun sudah dinyatakan, mengenai *States should: Continue to promote coherent and coordinated approaches to institutional frameworks for sustainable development at all national levels, including through, as appropriate, the establishment or strengthening of existing authorities and mechanisms*

sumber foto:
pioneerftui.wordpress.com



บันทึกคนเฒ่า

อีกเหิมใช้สิทธิ์ปฏิบัติตามฤกษ์เล่น

จุฬาราชมนตรีสัมภาษณ์ผู้ช่วยที่อุพิน ไวชะจนเหมือนตึกดา

Sumber: ruripuspitaa.blogspot.com

Huruf Jawa

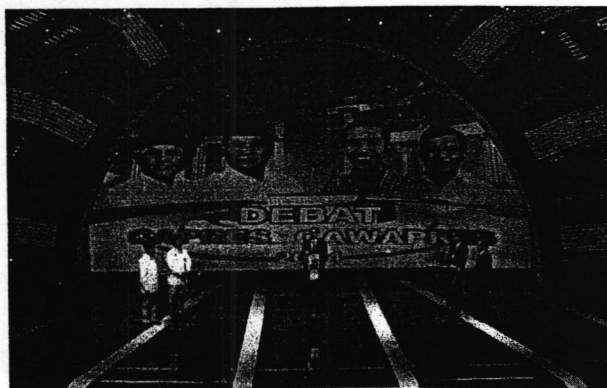
	ꦲ	ꦤ	ꦕ	ꦫ	ꦏ	\
	ha	na	ca	ra	ka	
	ꦢ	ꦠ	ꦱ	ꦮ	ꦭ	\
	da	ta	sa	wa	la	
	ꦥ	ꦢ	ꦗ	ꦪ	ꦺ	\
	pa	dha	ja	ya	nya	
	ꦩ	ꦒ	ꦧ	ꦠ	ꦺ	
	ma	ga	ba	tha	nga	

Sumber: www.gimonca.com

necessary for policy making, coordination and implementation and enforcement of laws. Demikian pula kesepakatan-kesepakatan internasional berikutnya.

Tentu kelembagaan lingkungan mengundang sorotan di sana sini yang masih kurang, karena memang luasnya pengertian “lingkungan hidup”. Ghalibnya, walaupun dinyatakan bahwa pengelolaan lingkungan dilakukan secara terpadu (“*integrated environmental management*”), namun kenyataannya kelembagaan lingkungan secara sektoral tetap berada pada institusi “Bhineka Tunggal Ika”, terutama oleh banyaknya kementerian terkait. Kelembagaan lingkungan (tingkat) nasional dilakukan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing yang dikordinasi oleh menteri. Norma ini menyangkut hubungan kerja sama mengenai pelaksanaan wewenang yang menurut Agenda 21 mengedepankan wawasan “*integrated environmental management (policy) approaches*”. Norma hukumnya telah demikian jelas sesuai dengan konsep “*integrated environmental management system*”, maka kelembagaan lingkungan dilakukan oleh satu institusi yang berwenang penuh secara integratif di bidang kebijakan sampai penegakan hukum yang mempunyai dampak signifikan terhadap lingkungan.

Pakde Karwo selaku Gubernur Jawa Timur selama ini telah mau dan berani mengeksekusi kompetensinya secara penuh dalam mengambil keputusan terhadap lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus dimulai dengan “perencanaan lingkungan” (“*environmental planning*”) yang matang dan eksekusi yang kuat. Penegakan hukum lingkungan perlu terus digelorakan secara massal. Di kala lingkungan dijadikan salah satu program prioritas, niscaya penyusunan kinerja pemerintahan harus ditetapkan untuk mewujudkannya. Kita semua tahu bahwa penyelamatan lingkungan selama ini berada pada titik yang sulit dikendalikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kata lingkungan agar dipakai sebagai salah satu “azimat sakti” pelaksanaan pemerintahan yang *pro-environment*, dan Pakde Karwo melakukan itu yang secara institusional



Sumber foto: Indonesia-baru.liputan6.com

telah meraih Penghargaan *Asasta Buana Kepemimpinan Lingkungan Hidup* karena Inovasi, komitmen dan konsistensi melakukan pembangunan dengan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang diserahkan Menteri Lingkungan Hidup di Hotel Bidakara Jakarta, 13 Oktober 2014.

Oleh karena itu, saatnya Jawa Timur atau dalam skala yang lebih besar tentulah Negara Indonesia harus siap bersaing untuk bertindak terdepan dalam MEA 2015 dan menyuarakan pesan perdamaian dunia seperti dinormakan Pembukaan UUD 1945. Akhirnya teringat ucap Jose Capdevilla yang disitir Mochtar Lubis: *aqui tengo una voz enardecida/aqui tengo una vida combatida .../aqui tengo un rumor, aqui tengo una vida ...* ini suaraku yang meradang/ini hidupku penuh perjuangan/ini pesanku, ini hidupku: *Green spirit*.

N. MEA DATANG JAWA TIMUR GEMILANG?

Pakde Karwo memberikan optimisme dalam memasuki babakan baru pergaulan antarbangsa melalui MEA 2015 untuk kesejahteraan rakyat. Posisi strategis dan daya jangkau perdagangan komoditas Jawa Timur senantiasa dikumandangkan dengan derajat yang harus terus dinamik-progresif serta meluas. Pangsa pasar produk Jawa Timur diungkapkan menjangkau beragam wilayah dunia sebagai penegas bahwa Jawa Timur telah menjalin serta berperan dalam percaturan global. Gambar berikut telah memberikan informasi umum yang sering dipaparkan oleh Pakde Karwo:

Sejak pencalonannya Pakde Karwo telah memiliki Visi-Misi sebagaimana dijelaskan dalam Visi-Misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, 12 Agustus 2013 dalam acara *Penyampaian Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2014-2019*. Beliau menyampaikan bahwa: "Memajukan Kesejahteraan Umum" merupakan amanat Pembukaan UUD 1945, yang harus dipegang teguh dan diupayakan terwujud. Pada periode 2009-2014, upaya mewujudkan "*Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak*" telah dilakukan dengan hasil capaian yang relatif signifikan, dan untuk selanjutnya pada periode 2014-2019 dibutuhkan kesinambungan disertai peningkatan kualitas, sehingga dapat terwujud Jawa

Timur yang lebih sejahtera, berakhlak, berkeadilan, mandiri, dan lebih berdaya saing. Untuk itulah visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan diwujudkan pada Periode 2014-2019 adalah "*Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing*". Visi Pakde Karwo itu dilakukan melalui misi: "*Makin Mandiri, dan Sejahtera Bersama Wong Cilik*". Jawa Timur tampak memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk persaingan di era MEA seperti yang terlihat dari paparan Pakde Karwo:



sumber foto: bappeda.jatimprov.go.id

Kepemimpinan Pakde Karwo telah memberikan daya juang pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang dibangun secara demokratis dan mengedepankan fungsi sebagai pelayan rakyat yang baik (*"good-services"*). Dalam lingkup ini Jawa Timur bertekad: *Sebagai Pintu Gerbang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Menuju Jawa Timur Lebih Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera*. Tekat ini merupakan penanda yang menjadi semangat bagi warga Jawa Timur, bahwa Jawa Timur mampu berdiri tegak dan tegar serta berfungsi laksana generator utama Pasar Bebas ASEAN yang mampu berkompetisi dengan baik. Semangat ini tidak akan padam dan harus terus digelorakan agar masyarakat Jawa Timur memang berdaya saing tinggi dan menjadi pemenang percaturan pasar ASEAN, bahkan Pakde Karwo mendorongnya dalam skala Asia. Dengan semangat itulah kita akan terus tumbuh berkembang dan berkelanjutan tanpa jeda. Hal ini tentu saja membutuhkan perhatian serius dari publik yang menangani bidang industri, jasa, perdagangan, pertanian, perkebunan, transportasi, koperasi, UMKM, dan seluruh *stakeholders*.

Mengikuti konstalasi dinamik tersebut, Pakde Karwo berupaya memberikan apa yang menjadi hak-hak rakyat dan menjalankan apa yang diamanatkan secara demokratis oleh rakyat. Cita dasar ini mengingatkan kita atas ungkapan puitis Sastrawan Freiligrath yang acap kali dirujuk Bung Karno dalam berpidato: *"man totet de Geist nicht"* yang arti bebasnya: "semangat tidak bisa dibunuh". Maka bersemangatlah menghadapi masa depan, terutama dalam gerbang persaingan MEA 2015 dengan penuh kemampuan bersaing, bekerja sama, bahu-membahu, tolong-menolong, bergotong-royong antarwarga Jawa Timur. Paling tidak warga Jawa Timur menggunakan produk hasil cipta karsanya sendiri dan kreasi bangsa Indonesia. Jaringan perdagangan antarpulau Nusantara telah dibuka oleh Pakde Karwo. Dengan kebersamaan, dengan kerukunan, dengan bergotong-royong, kita akan menjadi penentu perubahan komunitas ekonomi ASEAN, MEA bak cahaya dan energi baru bagi kesejahteraan rakyat.



Sumber foto: birohumas.jatimprov.go.id



Pakde Karwo sambang desa bersama Bude Karwo



Untuk itulah Pakde Karwo dengan seluruh jajarannya telah mufakat mewujudkan *Jawa Timur Lebih Berdaya Saing, Mandiri, dan Sejahtera*. Hal ini berarti kita semua memiliki orientasi utama terbangunnya masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur secara berkesinambungan dalam kepemimpinan Pakde Karwo dengan kemampuan yang terus diasah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menjaga martabat rakyat dengan meningkatkan kemandiriannya

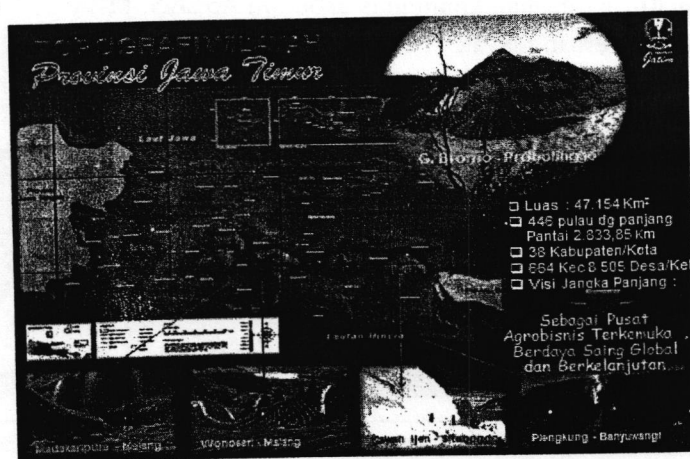
untuk sejahtera lahir batin. Rakyat Jawa Timur tentu memiliki mimpi dan perjuangan untuk hidup mandiri dan sejahtera. Pakde Karwo mesti selalu hadir dalam setiap gerak rakyat dengan menciptakan harmonisasi hubungan antarwarga dan antar-pelayan rakyat. Inilah titik penting untuk menjaga Jawa Timur sebagai poros keseimbangan dalam relasi demokrasi yang bermartabat dan mandiri dalam geliat rumpun MEA.

Kehidupan rakyat Jawa Timur harus dijadikan dasar memberikan optimisme masa depan yang lebih baik. Pakde Karwo telah mencapai capaian kinerja yang progresif-inovatif-optimistis dan kompetitif yang mampu membawa Jawa Timur lebih mandiri dan sejahtera dengan berbagai penghargaan yang telah diraih selama ini: 87 jenis penghargaan, buat Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan persembahan yang besar bagi masyarakat Jawa Timur dalam kepemimpinan Pakde Karwo di bidang pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan. Kerja sama menarik investor dari seluruh belahan dunia: Eropa, Amerika, Afrika, Asia, dan Timur Tengah.

Pakde Karwo telah membuktikan diri dengan membuat kebijakan publik (*public-policies*) sebagai tanda kelembagaan untuk berbuat yang bermanfaat bagi rakyat. Pada ruang kinerja (*performance-space*) inilah akan semakin argumentatif apabila pemerintahan Jawa Timur terus melanjutkan tata kelola pembangunan yang *pro-environment*. Pakde Karwo

pastilah senantiasa memotivasi terbangunnya masyarakat Jawa Timur sesuai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang mampu direalisasikan oleh penetapan target-target RKPD tahun 2015 yang mengusung tema: *"Penguatan Kemandirian Ekonomi Jawa Timur Melalui Pembangunan Industri: Hulu-Hilir, Agrobisnis dan Agroindustri, UMKM serta Infrastruktur"*.

Itulah komitmen yang Pakde Karwo persembahkan, dan men-



junjung tinggi mandat demokrasi yang penuh amanat itu secara bersama-sama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Jawa Timur. Bahkan kita semua ingat semboyan kerakyatan Pakde Karwo dalam memimpin, yaitu: *Wong Cilik Melu Gemuyu*. Konstelasi ini mendorong terwujudnya tata kehidupan pemerintahan yang baik pada dimensi *good governance* maupun *good corporate governance*, apalagi dalam gelombang MEA. MEA adalah kesempatan bagi Jawa Timur untuk jaya dan mencapai kembali peradaban gemilangnya yang pernah dipersembahkan oleh leluhur. Untuk itu Jawa Timur harus siap meningkatkan sektor-sektor perekonomian yang berbasis kemandirian agar siap bersaing dalam MEA. Jawa Timur dari darat dan lautnya, dari gunung dan sawah ladangnya, dari desa dan kotanya, dari mana pun teritorialnya dapat menjadi ruang bercita-cita sebagai pemegang persaingan dalam MEA 2015 ini. Tegasnya adalah: mari kita semua bergandeng tangan untuk berdarma dan berbakti demi kejayaan *Provinsi Jawa Timur Sebagai Pintu Gerbang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Menuju Jawa Timur Lebih Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera*. Mentari memang terbit dari timur dan niscaya Jawa Timur mendapatkan mandat kesemestaan untuk memancarkan sinar terang matahari bagi Indonesia dalam gerak laju MEA. Mari bersama membawa Jawa Timur gemilang di panggung MEA.

Referensi

- Al Gore. 2013 *The Future*. USA: WH Allen.
- Ananta Toer, Pramoedya. 2002. *Arus Balik*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Boechari. 2012. *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti*. Jakarta: Gramedia.
- Goerge Coedes, dkk., 2014. *Kedatuan Sriwijaya*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Kompas*. 1000 Tahun Nusantara. Jakarta. 2000.
- Lombard, Denys. 2008. *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Mpu Monaguna. 2014. *Kakawin Sumanasantaka*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Mpu Tantular. 2009. *Kakawin Sutasoma*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Munandar, Agus Aris. 2014. *Mitra Satata: Kajian Asia Tenggara Kuna*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Nugroho, Irawan Djoko. 2011. *Majapahit Peradaban Maritim*. Jakarta: Yayasan Suluh Nusantara Bakti.
- Oppenheimer, Stephen. 2010. *Eden in The East*. Jakarta: Ufuk.
- Prabowo, Agung. 2014. *The Pakubuwono Code*. Jakarta: Ufuk.
- Raffles, Thomas Stamford. 2014. *The History of Java*. Jakarta: Narasi.
- Rafiqi, Yusep. 2013. *Nabi Adam & Peradaban Nusantara*. Jakarta: Zahira.
- Riana, I Ketut. 2009. *Kakawin Desa Warnnana Uthawi Nagara Krtagama Masa Keemsasn Majaphit*. Jakarta: Kompas.
- Ricklefs, M.C. dkk., 2013. *Sejarah Asia Tenggara*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Rocher, Jean. 2011. *Perang Napoleon di Jawa 1811*. Jakarta: Kompas.
- Santos, Arysic. 2010. *Atlantis The Lost Continent Finally Found*. Jakarta: Ufuk.
- Soekarwo. *Meneguhkan Demokrasi Musyawarah Demi Kesejahteraan Rakyat*, Orasi

- Pelantikan, Gedung Negara Graha, Surabaya, 2014 dan berbagai dokumen publik yang dipaparkan Pakde Karwo dalam berbagai kesempatan selama tahun 2009-2014.
- Stockdale, John Joseph. 2003. *The Island of Java*. London: Periplus.
- Tim Hannigan. 2014. *Raffles and The British Invasion of Java*. Singapore: Monsoon Books Pre Ltd.
- Wahid, Abdurrahman. 2010. *Membaca Sejarah Nusantara*. Yogyakarta: LkiS.
- Wijoyo, Suparto. 2005. *Matarantai Pengaturan Hukum Lingkungan*. Surabaya: AUP.
- , 2012. *Hukum Lingkungan di Antara Para Pemalas*. Jakarta: AUP.
- , 2013. *Kusebut Indonesia*. Surabaya: AUP.
- , 2013. *Peranserta Masyarakat Jawa Timur Dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan*. Surabaya: Kapal Jawa Timur.
- Wolters, O.W. 2011. *Kemaharajaan Maritim Sriwijaya & Perniagaan Dunia Abad III-Abad VII*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Yergin, Daniel. 2011. *The Quest Energy, Security, and The Remaking of The Modern World*. New York: The Penguin Press.
- Zoetmulder, P.J. dan S.O. Robson. 2011. *Kamus Jawa Kuno Indonesia*. Jakarta: Gramedia.